

**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MENDUKUNG
MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH (MBM) PADA
MADRASAH TSANAWIYAH MAARIF SUKOREJO
PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**AMILA NADIYAH
10110096**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MENDUKUNG
MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH (MBM) PADA
MADRASAH TSANAWIYAH MAARIF SUKOREJO
PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan (S.Pd.I)

Diajukan Oleh:

**AMILA NADIYAH
10110096**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MENDUKUNG
MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH (MBM) PADA
MADRASAH TSANAWIYAH MAARIF SUKOREJO
PASURUAN

SKRIPSI

Oleh:
AMILA NADIYAH
10110096

Telah disetujui,
Pada Tanggal, 07 April 2014

Oleh
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Dr. Marno Nurullah, M. Ag
NIP. 19720822 200212 1 001

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MENDUKUNG
MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH (MBM) PADA
MADRASAH TSANAWIYAH MAARIF SUKOREJO
PASURUAN

SKRIPSI

dipersiapkan dan disusun oleh
Amila Nadiyah (10110096)

telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 15 April 2014 dan
dinyatakan

LULUS

serta diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd. I)

Panitia Ujian

Tanda Tangan

Ketua Sidang

Nurul Yaqien, M.Pd

NIP. 197811192006041001

: _____

Sekretaris Sidang,

Dr. Marno Nurullah, M. Ag

NIP. 197208222002121001

: _____

Pembimbing,

Dr. H. Agus Maimun, M.Pd

NIP. 196611212002121000

: _____

Penguji Utama,

Dr. Hj. Sulalah M. Ag

NIP. 196511121994032002

: _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. H. Nur Ali, M.Pd
NIP. 196504031998031002

PERSEMBAHAN

Terukir do'a dan terucap syukur dari lubuk hati yang teramat dalam serta ke ta'dhzyman senantiasa mengarungi buah karya yang sederhana ini. sebagai salah satu bukti kesungguhanku dalam meraih cita-cita, karya sederhana ini kepersembahkan kepada Ayah dan Ibu yaitu H. Roji'un dan Hj. Zakiyah yang senantiasa selalu mencurahkan do'a restunya yang melegakan kedahagaan intelektual putri-putrinya, yang penuh tetesan kasih sayang sebagai penyejuk jiwa, dan kasih sayang yang mengalir tiada henti.

My Sister(Mbak Kholifatur rossyadah, Amd.Keb dan Adek Fadillah Chabibun Nissa')

Special to My Beloved Mas Miftahul Arief Rahman, S.Pd.I u are my motivation thanks for all

Sahabat-sahabat semua, special to Itsna Durroti Layyinatul Syifa (MyRoommate) dan

Siti Nazilah Ulfa, Putri Dian Utari, Sylvia budi aprilianti, Izza Azizah, Miftahul Chusnia, dan semua sahabatku DI KOS PAK BARJI JL. Sunan Kalijaga Dalam No.18 A Malang tanpa kalian karya sederhana ini tidak akan terwujud.

Teman-teman dan sahabat-sahabatku di PMII dan PAI angkatan 2010, dari kalianlah aku mendapatkan banyak pengalaman hidup.

Untuk setiap orang yang selalu menginginkan perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia serta Agama Islam. Semoga ALLAH SWT selalu memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya Kepada kita semua. Amin.

MOTTO

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ الْأَعْمَشِ, عَنْ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ :
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا, سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
(رواه ابن ماجة و مسلم)

“Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Al A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW berkata: Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan jalan menuju surga” (HR. Ibnu Majah dan Muslim).¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al Mujadalah ayat :11).²

¹ Muhammad Nashiruddin Al- Albani, Shahih Sunan AT- Tirmidz (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 78

² Anggota IKAPI Jawa Barat, 2005, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro

Dr. H. Agus Maimun, M.Pd

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Amila Nadiyah

Malang, 07 April 2014

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar

Yang Terhormat,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

di

Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun
teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Amila Nadiyah

NIM : 10110096

Jurusan : PAI

Judul Skripsi : Peran Komite Madrasah dalam mendukung Manajemen
Berbasis Madrasah (MBM) MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak
diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,

Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 03 April 2014



Amila Nadiyah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah berjuang merubah kegelapan zaman menuju cahaya kebenaran, serta menjunjung nilai-nilai harkat dan martabat manusia menuju insan berperadapan.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis melalui kisah perjalanan panjang, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan serta kritik konstruktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku rektor UIN MALIKI Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Ali, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN MALIKI Malang
3. Bapak Dr. Marno Nurullah, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN MALIKI Malang
4. Bapak Dr. H. Agus Maimun, M.Pd, selaku Dosen Wali dan pembimbing skripsi terimakasih atas bimbingan, do'a dan motivasinya.
5. Bapak H. Roji'un dan Ibu Hj. Zakiyah (Ayah dan Ibu tercinta) yang telah mendidik dengan kasih sayang, tidak henti-hentinya mendo'akan dengan tulus

dan memberi semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S-1 di UIN MALIKI Malang. Tidak lupa kepada Kholifatur Rosyidah, Amd. Keb. dan Fadillah Chabibun Nissa' (*My sister*) serta Miftahul Arief Rahman, S.PdI (*My beloved*) yang telah menjadi motivator bagi penulis untuk terus berkarya.

6. Bapak H. Abu Nasir, Ibu Hj. Khomariah (Pakde dan Bude), seluruh keluarga di Pandaan, Bojonegoro dan Pekalongan, terimakasih sedalam-dalamnya atas do'a dan motivasinya.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN MALIKI MALANG.
8. Drs. H.M. Tauhid, M.PdI (Kepala Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan) beserta jajaran guru dan staf MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian pada penulis dan seluruh dewan guru serta karyawan MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
9. Drs. Wihanto, MM (Ketua Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan) yang memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian mengenai peran komite madrasah yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan serta saran yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
10. Kelompok 8 PKLI 2014. Terimakasih atas kebersamaannya, dan memberikan motivasi.

11. Sahabat-sahabat PAI angkatan 2010, semoga kita dapat menjadi pelita bagi bangsa ini dan sahabat-sahabat saya seperti Putri, Via, Izah, Nia, dan semuanya terimakasih atas kebersamaan yang sarat hikmah.
12. Sahabatku di Kos Jl.Sunan Kalijaga Dalam No.18 Lantai 3. Khususnya (*My Roommate*) Mbak Ayin yang selalu setia mendengarkan curahan hatiku dan selalu mendukung penyelesaian skripsi ini.
13. Ustadzah Nury Firdausia yang telah menjadi tempat belajarku untuk menulis skripsi ini, terimakasih atas bantuan, bimbingan, do'a dan motivasinya.

Hanya ucapan terimakasih sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan, semoga bantuan dan do'a yang telah diberikan dapat menjadi catatan amal kebaikan dihadapan Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat berharap saran dan kritik konstruktif dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dimasa mendatang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi yang membacanya, dan kepada lembaga pendidikan guna untuk membentuk generasi masa depan yang lebih baik. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Malang, 03 April 2014

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ء	=	,
ذ	=	dz	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

أُو = aw

أَيَّ = ay

أُو = û

إَيَّ = î

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN NOTA DINAS	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Ruang Lingkup Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. KOMITE MADRASAH	20
1. Sejarah Dan Konsep Dasar Komite Madrasah	20
2. Tujuan Komite Madrasah	26
3. Peran dan Fungsi Komite Madrasah	27
4. Struktur Organisasi Komite Madrasah	32

5. Mekanisme Pembentukan Komite Madrasah	33
6. Dasar Hukum Pembentukan Komite Madrasah	35
7. Komite Madrasah dalam Perspektif Islam	35
B. MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH (MBM)	38
1. Sejarah dan Konsep Dasar MBM	38
2. Tujuan dan Manfaat MBM	43
3. Implementasi dan Urgensi MBM	46
4. Komponen-Komponen dan aspek- aspek MBM	50
5. Karakteristik sekolah melaksanakan MBM.....	53
6. Faktor Pendorong dan Penghambat pelaksanaan MBM	55
7. Acuan Standar Pengelolaan MBM	57
8. MBM dalam Perspektif Islam	58
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Metode dan Jenis Penelitian	61
B. Kehadiran Peneliti	64
C. Lokasi Penelitian	65
D. Sumber Data	66
E. Metode Pengumpulan Data	68
F. Teknik Analisis Data	71
G. Pengecekan Keabsahan Data	72
H. Tahap-tahap Penelitian	74
1. Tahap Pra Lapangan	
2. Tahap Pekerjaan Lapangan	
3. Tahap Analisis Data	
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	76
A. Deskripsi Objek Penelitian	76
1. Lokasi Penelitian	76
2. Sejarah Singkat MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	76
3. Letak Geografis MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	77
4. Visi misi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	78
5. Tujuan MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	78

6. Organisasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	79
7. Sarana dan Prasarana MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	79
8. Kondisi Guru dan Siswa MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ...	83
9. Keberadaan Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	89
10. Tujuan Komite madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ..	92
11. Mekanisme Kerja komite madrasah	92
12. Peran inti Komite madrasah	93
13. Fungsi Komite madrasah	93
14. Program kerja Komite madrasah	94
15. Struktur Pengurus Komite madrasah	96
B. Paparan Data Penelitian	97
1. Peran Komite Madrasah dalam mendukung MBM MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	97
2. Upaya Komite Madrasah dalam mengevaluasi MBM MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	102
C. Temuan Penelitian	106
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	109
A. Peran Komite Madrasah dalam mendukung MBM MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	109
B. Upaya Komite Madrasah dalam mengevaluasi MBM MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	125
BAB VI PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
DAFTAR RUJUKAN	136
LAMPIRAN	138

DAFTAR TABEL

TABEL I : Indikator Kinerja Komite Madrasah Dalam Perannya Sebagai Badan Pertimbangan	29
TABEL II : Ciri-Ciri Manajemen Berbasis Madrasah	42
TABEL III : Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah	47
TABEL IV : Ciri-Ciri Sekolah Yang Melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah	53
TABEL V : Tipe Model Manajemen Berbasis Madrasah	55
TABEL VI : Jumlah Dan Kondisi Ruang Mts. Maarif Sukorejo Pasuruan	138
TABEL VII : Jumlah Dan Fasilitas Penunjang Mts. Maarif Sukorejo Pasuruan	139
TABEL VIII : Data Sumber Daya Manusia Tingkat Pendidikan Pegawai Mts. Maarif Sukorejo Pasuruan	140
TABEL IX : Data Siswa Mts. Maarif Sukorejo Pasuruan	141

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penelitian ke MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	142
Surat Keterangan Penelitian dari MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	143
Bukti Konsultasi.....	144
Foto dokumen Penelitian di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	145
Pedoman Interview	150
Struktur Organisasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	152
Struktur Pengurus Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan	153
Program Kerja MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.....	154
Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	157

ABSTRAK

Nadiyah, Amila. 2014. *Peran Komite Madrasah Dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi : Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, Departemen Pendidikan Nasional terdorong untuk melakukan reorientasi manajemen madrasah dari manajemen pendidikan berbasis pusat menjadi Manajemen Berbasis Madrasah (Manajemen Berbasis Madrasah). Adanya otonomi pendidikan merupakan salah satu bentuk dari bagian pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, untuk itu diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasikan pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah/Madrasah di tingkat satuan pendidikan. Hal ini mengacu pada Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004. Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.

Penelitian ini terfokus pada: (1) Program kerja komite Madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) (2) upaya komite madrasah dalam mengevaluasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) serta upaya komite madrasah dalam mengevaluasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM).

Penelitian ini bertempat di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan Jenis penelitian *deskriptif kualitatif*, serta dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Sumber data: Kepala Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, pengurus Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, dan guru-guru. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang ada untuk menggambarkan realitas sesuai dengan fenomena yang sebenarnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan telah menjalankan dari empat peran dan tujuh fungsi Komite madrasah. Selain itu, komite madrasah berperan dalam mengevaluasi MBM diantaranya monitoring pelaksanaan program dan mengadakan evaluasi seperti: (1) Rapat evaluasi pengurus Komite Madrasah setiap akhir semester, (2) Mengikuti rapat evaluasi bersama pengurus Madrasah, (3) Mengadakan pertemuan wali murid setiap dua tahun satu kali, (4) Membantu Madrasah dalam pencarian dana untuk pembangunan, perlengkapan sarana prasarana dan beasiswa guru/siswa.

Kata Kunci: *Peran Komite Madrasah, Manajemen Berbasis Madrasah.*

ABSTRACT

Nadiyah, Amila. 2014. *The Role of Madrasah Committee in Supporting Management Based on Madrasah (MBM) MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Thesis*, Islamic Education Major, Faculty of Ilmu Tarbiyah and Keguruan, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis Supervisor: Dr. H. Agus Maimun, M. Pd.

With the application of regional otonomy since January 1, 2001, department of national education conducts madrasah management reorientation from educational management based on center to be management based on Madrasah. With the existence of educational otonomy is one of the forms of the application of regional otonomy to increase educational quality. Therefore, it requires a place accommodating paradigm, aspiration and digging people's potential to create democracation, transpiration, and accountability of education. One of the places is integrated educational council. It refers to constitution number 25 at 2000 about national development program (Propenas) at April 2, 2002 about educational council and school committee.

The research focuses on: (1) work program of madrasah committee to support Management based on Madrasah (MBM) (2) the effort of madrasah committee to evaluate Management based on Madrasah (MBM). The purpose of the study is to describe the role of madrasah committee to support management based on madrasah (MBM) and the effort of madrasah to evaluate Management based on Madrasah (MBM).

The study takes place in MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. The method used is qualitative approach with descriptive qualitative. To collect the data, the writer uses observation, interview, and documentation. Data source: Head of Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan and teachers. The data, therefore, is analysed by using technique of descriptive qualitative describing data used to describe the reality which is suitable with the real phenomenon.

The study result indicates that madrasah committee MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan has run the four roles and seven functions of madrasah committee. Besides, madrasah committee has role to evaluate MBM to monitor implementation of program and to evaluate such as: (1) evaluation of madrasah committee in the end of the semester, (2) to follow the evaluation madrasah managers, (3) to conduct the meeting with parents once in two years, (4) to help madrasah to get fund for physical development, facilities, and scholarship for teachers and students.

Keywords: Role of Madrasah Committee, Management based on Madrasah.

المستخلص

نادية ، أميلا . ، عام ٢٠١٤ . دور اللجنة في دعم المدارس الدينية للإدارة القائمة على المدارس الدينية (MBM) النظام التجاري المتعدد الأطراف . معاريف سوکاراجا فاسوروان . بحث جامعي، قسم التربية الإسلامية ، كلية علوم التربية و التعليم ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج . المشرف: الدكتور الحاج أغوس ميمون الماجستير.

مع تنفيذ الحكم الذاتي الاقليمي منذ ١ يناير ٢٠٠١ ، تشجع وزارة التربية والتعليم لإعادة توجيه إدارة المدارس الدينية القائمة على إدارة يصبح المركزية القائمة على إدارة المدارس الدينية (إدارة القائمة على المدارس الدينية) . الحكم الذاتي التعليمية هو شكل من أشكال الحكم الذاتي الاقليمي أجزاء من أجل تحسين نوعية التعليم ، فمن الضروري للحاوية التي يمكن أن تستوعب آراء وتطلعات و استكشاف إمكانات المجتمعات لضمان الديمقراطية والشفافية ، والمساءلة في مجال التعليم. واحدة من هذه الحاويات هي مجلس التعليم في التعليم للجنة اللوائية / المدينة و المدرسة / المدارس الدينية على مستوى وحدة . هذا يشير إلى القانون رقم ٢٥ لعام ٢٠٠٠ على برنامج التنمية الوطنية (بروبيناس) ٢٠٠٠-٢٠٠٤ . كما تنفيذ التشريعات ، أصدر المرسوم الصادر عن وزير التعليم الوطني رقم ٠٤٤ / U / ٢٠٠٢ / ٢ أبريل ٢٠٠٢ في مجلس التعليم و اللجان المدرسية.

وأسئلة في هذا البحث هي: (١) برنامج عمل لجنة المدارس الدينية في دعم الإدارة القائمة على المدارس الدينية . (٢) محاولات حنة المدرسة في تقييم الإدارة القائمة على المدارس الدينية . هدف هذه البحث لوصف دور اللجنة في دعم الإدارة القائمة على المدارس الدينية المدارس الدينية، وكذلك الجهود التي تبذلها اللجنة لتقييم المدارس الدينية القائمة على إدارة المدارس الدينية.

هذا البحث في المدرسة المتوسط معارف في سوکاراجا فاسوروان، ومنهجية هذا البحث المدخل الكيفي بالبحث الكيفي الوصفي، وأدوات لجميع البيانات الملاحظة، المقابلة، مصادر البيانات: رئيس المدرسة المتوسط معارف سوکاراجا فاسوروان، أعضاء اللجنة المدرسة المتوسط معارف سوکاراجا فاسوروان والمعلمين. كانت البيانات ثم تحليلها باستخدام تقنيات التحليل الكيفي الوصفي، الذي يصف البيانات المتاحة لوصف الواقع وفقا للظاهرة الفعلية.

نتائج هذه البحث أن لجنة المدرسة المتوسط معارف سوکاراجا فاسوروان أن النظام التجاري المتعدد. قد تعمل في أربع دور من سبعة أهداف اللجنة المدارس الدينية . بالإضافة ، كانت لجنة المدارس الدينية دورا في تقييم و مراقبة منهم: مراقبة و برنامج، وتقويم مثل : (١) اجتماع تقييم أعضاء اللجنة المدارس الدينية نهاية كل انتهائي الدراسي، (٢) تابع اجتماع تقويم مع مجلس المدارس الدينية ، (٣) أن يكون حاضرا على الوالدين كل سنتين مرة واحدة، (٤) مساعدة المدرسة الدينية في بحث المال/ثود لبناء و معدات البنية التحتية والمنح الدراسية المعلم / الطالب. غغب لالا ٦٥

الكلمات الرئيسية : دور المدارس الدينية للجنة والإدارة القائمة على المدارس الدينية.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pendidikan di dalam kehidupan masyarakat dapat melahirkan generasi yang berbudi luhur dan memiliki wawasan yang luas. Hal ini karena pendidikan, pada intinya sebagai aktivitas kesadaran yang dirancang untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya pendidikan, diharapkan membantu masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup baik yang bersifat manual individual maupun sosial. Sudah barang tentu, pendidikan sesungguhnya merupakan fenomena dan rentetan peristiwa perjumpaan dua orang atau lebih yang dampaknya berakibat berkembangnya pandangan hidup, sikap hidup, atau keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak.¹

Situasi pendidikan di zaman sekarang berbeda dengan di zaman orde baru. Perbandingan itu nampak dalam tiga aspek, yakni: pertama, transparansi keuangan. Kedua, aspek komunikasi. Ketiga, aspek sarana prasarana. Transparansi berkaitan dengan banyaknya kasus penggelapan uang atau korupsi yang terjadi di lingkungan madrasah, sedangkan aspek komunikasi lebih dikarenakan minimnya interaksi dan pemahaman dikalangan pengelola madrasah dengan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di lingkungannya. Sementara masalah yang muncul dari

¹ Syaiful Sagala, *Administrasi pendidikan kontemporer*, (Bandung: Alfabeta cv, 2008), hlm.1

aspek sarana dan prasarana adalah minimnya bantuan dan kurang lengkapnya sarana dan prasarana tersebut dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Mengomentari pernyataan diatas, Husaini Usman menyebut adanya pola sentralistik yang dikembangkan orde baru dalam mengelola pendidikan di tanah air. Pada pola ini madrasah ditempatkan pada posisi marginal kurang diberdayakan, kurang mandiri, pasif atau menunggu instruksi, bahkan inisiatif dan kreativitasnya untuk berkembang terpasung. Akan tetapi, dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, Depdiknas terdorong untuk melakukan reorientasi manajemen madrasah dari manajemen pendidikan berbasis pusat menjadi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM).²

Konsep pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan madrasah yang terkandung didalamnya memerlukan pemahaman berbagai pihak terkait, terutama menyangkut dimana posisi dan apa manfaatnya. Pelibatan masyarakat dalam pendidikan ini dirasa sangat diperlukan, dan sekarang diharapkan tidak hanya konsep wacana, tetapi lebih pada action di lapangan. Selama ini dalam realitanya pelibatan masyarakat dalam pendidikan lebih pada tataran konsep, wacana, atau slogan, masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.³

Jika dilihat pada konteks manajemen pendidikan sekarang ini berbeda dari manajemen pendidikan sebelumnya yang semua serba diatur

² Husaini Usman, *Manajemen (Teori, praktik, dan riset pendidikan)*, (Jakarta: Bumi Aksara 2010), hlm. 623

³ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 89

dari pemerintah pusat. Sebaliknya, manajemen pendidikan model MBM ini berpusat pada sumber daya yang dimiliki oleh madrasah itu sendiri untuk mengembangkan madrasah dengan kata lain segala yang menyangkut manajemen madrasah dikelola oleh madrasah itu sendiri secara mandiri. Akan tetapi, tetap mengacu pada standar Nasional.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dua landasan normatif tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi rambu-rambu bagi pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Akan tetapi, perlu juga adanya standarisasi dan pengendalian mutu secara nasional sebagai Peran membentuk kesatuan “referensi” dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Standar pendidikan ini telah diperkuat dengan adanya PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.⁴

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan salah satu jawaban pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan dan telah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tersebut. Oleh karena itu, MBM wajib diketahui, dihayati dan diamalkan oleh warga negara Indonesia terutama mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan.

⁴Umiarso dan Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*, (Jogjakarta:IRCiSoD, 2010), hlm. 68

Dalam konsep MBM, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah cukup luas, namun karena berbagai alasan pelaksanaannya masih terbatas pada hal-hal seperti: pertama keterlibatan masyarakat (orang tua siswa, anggota Komite Madrasah, tokoh masyarakat dan sebagainya) dalam bentuk dukungan dana atau sumbangan yang berupa fisik saja. Kedua, partisipasi masyarakat masih terbatas dalam Komite Madrasah. Ketiga, Komite Madrasah masih dianggap sebagai perpanjangan tangan Kepala Madrasah untuk mengkoordinasi partisipasi orang tua atau wali peserta didik. Keempat, belum terdapat hubungan dan kerjasama yang produktif antara Komite Madrasah dan pihak yayasan di madrasah. Dan kelima, Komite Madrasah belum mencerminkan keterwakilan masyarakat dalam madrasah.⁵

Menurut Umaedi, konsep yang menawarkan kerja sama yang erat antara madrasah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing ini, berkembang berdasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepala madrasah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya madrasah yang ada. Sejalan dengan pemikiran ini, tim teknis Bappenas dan Bank Dunia menyatakan bahwa pemberdayaan madrasah dengan memberikan otonomi yang lebih besar di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga

⁵Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Manajemen berbasis Madrasah*, (Jakarta:2009), hlm.63-64

dapat ditunjukkan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan.⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa MBM merupakan implementasi dari pemberian otonomi kepada madrasah untuk memberdayakan diri dalam kerangka peran peningkatan untuk pendidikan. Serta penerapan demokratisasi pendidikan dilakukan dengan mengikut sertakan unsur-unsur pemerintah setempat, masyarakat, orang tua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan.

Selain itu, dalam pengembangan lembaga pendidikan islam (madrasah) akan lebih efektif manakala melibatkan Komite Madrasah. Hal ini disebabkan Komite Madrasah memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan lembaga pendidikan islam (madrasah) seperti terlibat dalam mendukung MBM. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/u/2002 menyebutkan keberadaan Komite Madrasah memiliki prinsip-prinsip (a) transparan, akuntabel, dan demokratis dan (b) merupakan mitra madrasah atau madrasah.⁷

Perangkat organisasi Komite Madrasah **minimal** yang harus ada, yang memungkinkan berjalannya roda organisasi Komite Madrasah adalah Personel Komite Madrasah, struktur Organisasi disertai *job description* setiap personel dan tata hubungan antarpersonel, panduan Organisasi (antara

195 ⁶Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Madrasah*, (Jakarta, Rineka Cipta:2004), hlm.

⁷ Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 044/u/2002 tanggal 2 april 2002

lain berupa AD/ART), fasilitas penunjang (Kantor/Sekretariat, tenaga administrasi).⁸

Oleh karenanya, keberadaan Komite Madrasah menjamin adanya transparansi pengelolaan baik untuk warga madrasah maupun masyarakat umum. Tanpa adanya Komite Madrasah suasana madrasah tampak kurang maksimal, karena kurangnya fasilitas yang memadai dan kurangnya interaksi atau keterlibatan masyarakat dalam kemajuan madrasah dalam mencapai tujuan. Sehingga Komite Madrasah memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan itu juga melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri dan pemerintah, berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Dari beberapa fungsi Komite Madrasah di atas dapat efektif hanya kalau ada tata pelayanan publik yang baik (*good governance*).

Dapat ditinjau dari tujuan Komite Madrasah, antara lain: Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, cara yang dapat dilakukan menumbuh kembangkan tanggung jawab dan peran

⁸Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan, *Modul 2 Peningkatan Kemampuan Organisasional Komite Sekolah*, hlm.9

serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah dengan memperbanyak frekuensi dan komunikasi dikalangan guru, orang tua dan masyarakat. Komunikasi menjadi salah satu syarat untuk menciptakan madrasah yang efektif. Sebagaimana dijelaskan oleh Mulyasa, madrasah efektif itu terbangun manakala setiap Komite Madrasah mampu berkomunikasi dengan setiap orang dengan alokasi waktu tenaga dan tepat.⁹

Dengan demikian, akan tercipta suasana dan kondisi madrasah transparan, akuntabel, serta demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Faktanya, saat ini Komite Madrasah dijadikan sebagai formalitas pada lembaga pendidikan.

Masyarakat memiliki keterlibatan yang luas dalam dunia pendidikan mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Lebih jauh, unsur masyarakat yang dilibatkan atau berpartisipasi dalam dunia pendidikan berasal dari: (a) perwakilan orang tua atau wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis; (b) tokoh masyarakat (ketua RT/RW, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat); (c) dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain); (d) organisasi profesi tenaga pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan; (e) organisasi profesi tenaga pendidikan; (f) perwakilan peserta didik seperti Ketua Osis serta perwakilan alumni dari lembaga madrasah islam.¹⁰

⁹ Mulyasa, *Manajemen dan kepemimpinan Kepala Madrasah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.22

¹⁰ Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 044/u/2002 tanggal 2 april 2002

Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Madrasah ditetapkan di dalam AD/ART. Dalam menjalankan tugasnya, komite Madrasah menjalankn sesuai dengan peranannya, dibentuk kepengurusan Komite Madrasah dengan jumlah sekurang-kurangnya terdiri atas: ketua, sekretaris dan bendahara. Dan pemilihan pengurus Komite Madrasah dipilih oleh anggota dan bukan berasal dari satuan pendidikan. Ada konflik kepentingan jika ikut; mereka tidak mewakili masyarakat tapi penyelenggara atau *service provider*.

MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan adalah salah satu madrasah meskipun berstatus swasta akan tetapi menghasilkan input dan outputnya berkualitas

Madrasah Tsanawiyah Maarif Sukorejo Pasuruan merupakan lembaga pendidikan atau madrasah yang berdiri atas perjuangan para Tokoh-Tokoh atau ulama serta Komite Madrasah yang tergabung dalam kepengurusan YP. Maarif Sukorejo. Oleh karenanya, peran Komite Madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dapat mendukung terlaksananya program-program Madrasah, serta membantu Madrasah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas *input*, *proses* dan *output* pendidikan dengan memberikan sumbangan pemikiran, mereformasi SDA dan SDM yang ada di Madrasah, serta menjalin kerjasama yang kuat dengan

elemen masyarakat dan pemerintah. dan telah memiliki organisasi Komite Madrasah sejak tahun 2003.¹¹

Peneliti memilih jenis penelitian *Deskriptif Kualitatif* karena penelitian tentang peran komite madrasah dalam mendukung MBM MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan tidak hanya cukup dengan kajian teori tentang komite madrasah dan MBM saja, perlu penelitian langsung ke lokasi yang diteliti, yang dikenal dengan istilah observasi dan menggunakan pendekatan yang sistematis yang disebut kualitatif. Dengan demikian data konkrit dari data primer dan sekunder benar-benar dapat dipertanggung jawabkan sebagai kesimpulan akhir dari hasil penelitian.

Fakta tersebut menarik bagi peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang peran dan Peran Komite Madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, sehingga diangkat dalam penulisan skripsi ini dengan judul: *Peran Komite Madrasah dalam mendukung (Manajemen Berbasis Madrasah) MBM MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan* dengan alasan dapat memberi jawaban sekaligus kontribusi positif terhadap pemahaman masyarakat tentang Komite Madrasah dengan mengetahui kinerja Komite Madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berangkat dari latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu diteliti yaitu:

¹¹ Observasi pada tanggal 19 September 2013, pukul 09.00-11.00, dengan Bpk. Moh. Nukhin sebagai Anggota Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

1. Bagaimana peran Komite Madrasah dalam mendukung MBM di MTs.

Maarif Sukorejo Pasuruan?

2. Bagaimana Upaya Komite Madrasah dalam mengevaluasi MBM di MTs.

Maarif Sukorejo Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berpijak pada rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peran Komite Madrasah dalam MBM di MTs.

Maarif Sukorejo Pasuruan.

2. Untuk mendeskripsikan Upaya Komite Madrasah dalam mengevaluasi

MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi mengenai Peran Komite madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya untuk:

1. Bagi pengembangan khasanah keilmuan

Hasil penelitian ini dapat menambah keilmuan manajemen pendidikan khususnya yang terkait dengan Peran Komite Madrasah dalam manajemen berbasis madrasah. Selain itu, penelitian ini juga menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti Peran Komite Madrasah dalam mendukung manajemen berbasis madrasah pada lembaga pendidikan.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman peneliti yang berkaitan dengan Peran Komite Madrasah dalam manajemen berbasis madrasah pada lembaga pendidikan.

3. Bagi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola dan Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan sebagai acuan dalam implementasi MBM di lembaga pendidikan tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan tinjauan pustaka, peneliti belum menemukan hasil penelitian terdahulu yang sama dan serupa dengan penelitian yang menjadi objek peneliti. Namun demikian, peneliti mendapatkan hasil penelitian yang hampir sama dengan beberapa penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti.

No	Peneliti	Judul	Objek	Hasil
1	Revi Trimadona (Skripsi), UIN Maliki Malang, 2009	Peranan Komite Madrasah dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar guru di Madrasah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20Plaju Palembang Sumatera Selatan	Kepala madrasah, Ketua Komite Madrasah, dan Guru SMP Negeri 20 Plaju Palembang Sumatera Selatan.	Fokus dari Komite Madrasah yang ada di SMP Negeri 20 Plaju Palembang melaksanakan perannya sebagai partner dari kepala madrasah dan guru-guru untuk melakukan kerjasama dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas

				pendidikan sesuai dengan kondisi madrasah
2	Malik Asrori (Skripsi), UIN Maliki Malang, 2010	Peran Komite Madrasah Dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar Dan Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang.	Kelapa madrasah, ketua Komite Madrasah, sekretaris Komite Madrasah, anggota komite, di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang	Di fokuskan Komite Madrasah sebagai badan mandiri yang menjadi mitra madrasah dalam menunjang proses belajar dan peningkatan mutu pendidikan, melalui fungsi Komite Madrasah yang menjadi landasan program kerja Komite Madrasah sesuai AD/ART untuk terwujudnya proses belajar yang efektif, berkualitas dan meningkatnya mutu pendidikan madrasah menjadi lebih unggul, maju dan sukses.
3	Miftahul Arief Rahman (Skripsi), UIN Maliki Malang, 2012	Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro (Studi Kasus Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro)	Kepala madrasah, Ketua Komite Madrasah, Guru dan masyarakat sekitar MTs. Darul Ulum Baureno Bojonegoro	Fokus dari Peran Komite Madrasah di MTs. Darul Ulum Baureno Bojonegoro adalah berusaha menumbuhkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan bermutu dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat dengan menampung ide atau aspirasi yang akan dijadikan pertimbangan kepala madrasah dalam penentuan kebijakan

				di MTs. Darul Ulum Baureno Bojonegoro.
4	Haris Bahtiar (Skripsi), UIN Maliki Malang, 2009	Peran Komite Madrasah dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMP Islam Jabung Malang.	Kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, ketua Komite Madrasah, wakil ketua Komite Madrasah, sekretaris Komite Madrasah SMP Islam Jabung Malang	difokuskan pada peran komite dalam mengembangkan SMP Islam Jabung Malang sebagai paradigma baru pendidikan, dimana madrasah memberikan kewenangan yang luas bagi Komite Madrasah untuk membantu mengelola sumber daya yang ada. Dengan meninjau berhasil tidaknya kurikulum dalam penerapannya madrasah di lihat dari kemampuan orang-orang yang melakukan atau menjalankan kurikulum untuk mencapai pengembangan kurikulum di SMP Islam Jabung Malang.

5	Salman Zahidi (Skripsi), UIN Maliki Malang, 2009	Peran Komite Madrasah dalam peningkatan mutu tenaga kependidikan di MTs. Kanjeng Sepuh Sidayu Gesik	Kepala madrasah, ketua Komite Madrasah pengurus Komite Madrasah, guru madrasah, orang tua siswa,	Di fokuskan pada Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu tenaga kependidikan di madrasah dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat perlu adanya pengembangan sarana komunikasi madrasah, orang tua dan masyarakat sebagai kontrol terhadap kualitas perkembangan pendidikan.
---	--	---	--	---

Berdasarkan tabel di atas, penelitian yang dilakukan Revi Trimadona, menghasilkan temuan pelaksanaan peran Komite Madrasah dapat berjalan baik manakala diposisikan partner dari kepala madrasah. Sedangkan hasil penelitian Malik Asrori dan Salman Zahidi, menghasilkan temuan bahwa Komite Madrasah sebagai badan mandiri yang menjadi mitra madrasah dalam menunjang proses belajar dan peningkatan mutu pendidikan, melalui fungsi Komite Madrasah yang menjadi landasan program kerja Komite Madrasah sesuai AD/ART. Adapula hasil penelitian yang dilakukan Miftahul Arief Rahman dan Haris Bahtiar hampir sama menghasilkan peran komite dalam mengembangkan SMP Islam Jabung Malang sebagai paradigma baru pendidikan, dimana madrasah memberikan kewenangan yang luas bagi Komite Madrasah untuk membantu mengelola sumber daya yang ada di Madrasah tersebut.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, peneliti memfokuskan objek penelitian tentang Peran Komite Madrasah dalam mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Oleh karena itu penelitian mengenai peran dan Peran Komite Madrasah sangat relevan dan perlu dilakukan, mengingat lembaga pendidikan ini masih terus mencari format Komite Madrasah yang ideal agar mutu pendidikan semakin baik.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Untuk menghindari terjadinya persepsi lain mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, peneliti perlu membatasi pada permasalahan Peran Komite Madrasah dalam mendukung MBM sehingga dampaknya akan terasa pada kualitas *input*, *proses* dan *output* pendidikan. Maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi peran dan fungsi komite sekolah dengan masyarakat dalam mendukung MBM MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.
2. Program kerja komite madrasah dalam mendukung MBM MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.
3. Strategi Komite Madrasah dalam mengevaluasi MBM MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.
4. Lokasi penelitian terbatas hanya pada MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan pada sekolah lain yang berbeda jenis maupun jenjang pendidikan.
5. Dilihat dari segi waktu dan data yang diperoleh merupakan pencerminan dari keadaan pada saat penelitian dilangsungkan, sehingga apabila

penelitian ini dilaksanakan pada waktu yang lain, maka terdapat kemungkinan bahwa hasilnya akan berbeda pula sesuai dengan perkembangan. Maka dari itu untuk mengambil data yang diperlukan, peneliti melakukan penelitian tentang Komite Madrasah sebagai salah satu faktor dalam mendukung MBM MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

G. Definisi Operasional

Dari keterangan di atas, definisi istilah yang diberikan oleh peneliti dari penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang berjudul: *Peran Komite Madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan* antara lain mengemukakan definisi istilah penelitiannya sebagai berikut:

1. Peran adalah aktifitas seseorang atau golongan yang ikut serta (berpartisipasi, terlibat) untuk mewujudkan suatu tujuan.¹²
2. Komite Madrasah dalam Undang-Undang Sisdiknas (2003) adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di madrasah yang beranggotakan orang tua atau wali siswa, komunitas madrasah serta tokoh masyarakat dan berfungsi memberikan pertimbangan tentang manajemen madrasah.¹³
3. Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) adalah sebagai suatu model manajemen yang memberikan model otonomi lebih besar kepada

¹² W.J.S Poerwadarminta (diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud), *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 735.

¹³ Mulyasa, *Manajemen dan kepemimpinan Kepala Madrasah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.126-127

madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga madrasah (guru, siswa, kepala madrasah, pegawai madrasah, orang tua siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.¹⁴

4. MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan adalah lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Maarif Sukorejo Pasuruan. Dengan alamat Jl. Kamajaya Teks No.96 Sukorejo Pasuruan dan mengikuti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kabupaten Pasuruan.

Dengan demikian, yang dimaksud Peran Komite Madrasah dalam mendukung MBM dalam penelitian ini adalah usaha yang di bangun oleh badan mandiri dari setiap madrasah guna mewedahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di madrasah yang beranggotakan orang tua atau wali siswa, komunitas madrasah serta tokoh masyarakat dan berfungsi memberikan pertimbangan tentang manajemen madrasah dengan pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga madrasah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, peneliti memperinci dalam sistematika pembahasan sebagai berikut: bagian *pertama* yaitu bagian yang berada sebelum tubuh kerangka yang meliputi halaman

¹⁴Umiarso dan Imam Gojali, *Manajemen Mutu Madrasah di Era Otonomi Pendidikan*, (Jogjakarta:IRCiSoD, 2011), hlm. 72

judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, kata pengantar, daftar isi dan abstrak. Bagian *kedua* (tubuh kerangka) terdiri dari 6 bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi gambaran pokok pikiran untuk memberikan gambaran terhadap inti pembahasan, pokok pikiran tersebut masih bersifat global. Pada bab ini terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, alasan pemilihan judul, ruang lingkup penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori

Pada bab ini dikaji beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian, antara lain: pengertian Komite Madrasah, konsep dasar Komite Madrasah, kedudukan dan sifat Komite Madrasah, tujuan Komite Madrasah, fungsi Komite Madrasah, peran Komite Madrasah, unsur-unsur Komite Madrasah, Komite madrasah menurut pandangan Islam, konsep Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), Tujuan dan manfaat Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), Komponen Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), Karakteristik madrasah menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), Acuan Standar Pengelolaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), faktor pendukung dan penghambat Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), Manajemen Berbasis Madrasah dalam perspektif Islam.

Bab III Metode Penelitian

Membahas secara khusus tentang metode penelitian yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian

Menguraikan tentang gambaran obyek penelitian dan hasil penelitian yang berisi tentang profil Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, program kerja Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, peran Komite Madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah, meliputi, manajemen pegawai edukatif dan administratif, proses pembelajaran, pengelolaan, keorganisasian, sarana prasarana dan lulusan/alumni MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

Bab V Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari hasil analisis paparan data penelitian dan temuan dari aktualisasi penelitian terhadap peran komite di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

Bab VI Penutup

Merupakan bab akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran (rekomendasi konstruktif) dalam Peran komite madrasah dalam mendukung MBM selanjutnya. Sekaligus daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang erat hubungannya dengan data skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Komite Madrasah

1. Sejarah komite Madrasah

Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra madrasah, jalur pendidikan madrasah maupun jalur pendidikan luar madrasah.¹

Komite madrasah merupakan badan mandiri yang mewadahi pertan serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di madrasah.²

Menurut Djam'an Satori (2001), menyebutkan bahwa Komite Madrasah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan madrasah. Hal-hal tersebut meliputi:³

- 1) Penyusunan perencanaan strategi madrasah, yaitu strategi pengembangan madrasah dalam perspektif 3-4 tahun mendatang. Dalam dokumen ini juga dibahas visi dan misi madrasah, analisis posisi untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi, kajian isu-isu strategi madrasah, perumusan program-program, perumusan strategi pelaksanaan program, cara pengendalian dan evaluasinya.

¹Mendiknas, *Lampiran II Keputusan Nomor 044/U/2002* Tanggal 2 April 2002, hlm.7

²Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Madrasah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 55

³Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008), hlm. 258-259

- 2) Penyusunan perencanaan tahunan madrasah, yang merupakan elaborasi dari perencanaan strategi madrasah. Dalam perencanaan tahunan yang dibahas adalah program-program operasional yang merupakan implementasi program prioritas yang dirumuskan dalam perencanaan strategi madrasah yang disertai perencanaan anggarannya.
- 3) Mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota Komite Madrasah. Hal-hal tersebut merupakan refleksi kepedulian para *stakeholder* madrasah terhadap berbagai aspek kehidupan madrasah yang ditujukan pada peran-peran perbaikan, kemajuan dan pengembangan madrasah.
- 4) Memikirkan strategi untuk memajukan madrasah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas madrasah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan bagi pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif madrasah sesuai dengan aspirasi *stakeholder* madrasah. Perhatian terhadap masalah ini dimaksudkan agar madrasah setidaknya memenuhi standar pelayanan minimum.
- 5) Mendorong madrasah untuk melakukan internal monitoring (*school self-assesment*) dan melaporkan hasilnya untuk dibahas dalam forum Komite Madrasah.
- 6) Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/institusi eksternal dalam Peran menjaga jaminan mutu (*quality assurance*) seperti yang diatur dalam PP No. 25 tahun 2000.

- 7) Membahas laporan tahunan madrasah sehingga memperoleh penerimaan Komite Madrasah. Laporan tahunan madrasah tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota.
- 8) Memantau kinerja madrasah, yang meliputi manajemen madrasah, kepemimpinan kepala madrasah, mutu belajar mengajar termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar siswa, disiplin dan tata tertib madrasah, prestasi madrasah, baik dalam aspek intra maupun ekstrakurikuler.

Konsep komite madrasah mulai dihulirkan sejak 2 April 2002, meskipun fungsinya secara spesifik lokal mungkin saja telah ada yang menjalankannya jauh lebih dahulu sebelumnya. Konsep pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan madrasah yang terkandung didalamnya memerlukan pemahaman berbagai pihak terkait, terutama menyangkut dimana posisi dan apa manfaatnya. Pelibatan masyarakat dalam pendidikan ini dirasa sangat diperlukan, dan sekarang diharapkan tidak hanya konsep wacana, tetapi lebih pada action di lapangan. Selama ini dalam realitanya pelibatan masyarakat dalam pendidikan lebih pada tataran konsep, wacana, atau slogan, masih sangat jauh dari apa sangat diharapkan.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya adalah:

- 1) Hak dan kewajiban Masyarakat

⁴ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 89

Pada pasal 8 dan 9 UUSPN disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan pasal 9 menyebutkan bahwa masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

2) Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah

Pasal 10 UUSPN menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah: a) wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, b) wajib menjamin tersedianya daya guna dan terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan diatur dalam pasal 54 UUSPN, yaitu:

- a) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan,
- b) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Secara lebih spesifik, pada pasal 56 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite madrasah, yang berperan:

- 1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite madrasah;
- 2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis;
- 3) Komite madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Peran serta masyarakat itu lebih tegas disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang dewan pendidikan dan komite madrasah, mereka berperan sebagai berikut:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- 2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.

- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dengan masyarakat.

Sedangkan fungsi komite madrasah (pada level madrasah) menurut Kepmendiknas No. 044/U/2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBM)
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - d. Kriteria tenaga kependidikan
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan
 - f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan

- 5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 6) Menggalangkan dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.⁵

Dalam Undang-undang Sisdiknas (2003) dikemukakan bahwa komite madrasah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/ wali siswa, komunitas madrasah serta tokoh masyarakat, dan berfungsi memberikan pertimbangan tentang manajemen madrasah.

2. Tujuan Komite Madrasah

Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No:44 tanggal 2 april tahun 2002 menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya komite madrasah adalah:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam dunia penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

⁵Hadiyanto, *Mencari sosok desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia* (Jakarta:PT RINEKA CIPTA, 2004)Hlm.84-88

- c. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komite madrasah itu di bentuk dalam rangka membantu menciptakan atau mewadahi partisipasi pada *stakeholder* agar turut serta dalam mendukung manajemen berbasis madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya, yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program madrasah secara proporsional, sehingga komite madrasah dapat meningkatkan mutu pendidikan.

3. Peran dan fungsi Komite Madrasah

Adapun peran yang dijalankan Komite Madrasah adalah sebagai berikut:⁷

- a) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di madrasah.
- b) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud pemikiran, finansial, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah.
- c) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran mutu pendidikan di madrasah.
- d) Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di madrasah.

⁶ Mendiknas, lampiran II Surat Keputusan No. 044/U/2002, (Jakarta:2002)hlm.11

⁷ Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Madrasah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) hlm. 56

Untuk menjalankan perannya tersebut, Komite Madrasah berfungsi sebagai berikut:⁸

- a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di madrasah.
- b) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c) Menampung dan menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada madrasah mengenai: kebijakan dan program pendidikan; Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBM); kriteria kinerja madrasah; kriteria tenaga kependidikan; kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e) Mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di madrasah.
- g) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di madrasah.

⁸ Ibid, hlm. 57

**Tabel I: Indikator Kinerja Komite Madrasah
Dalam perannya sebagai Badan Pertimbangan.⁹**

PERAN KOMITE MADRASAH	FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN	INDIKATOR KINERJA
Badan Pertimbangan (<i>Advisor Agency</i>)	1. Perencanaan madrasah	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat. b. Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS. c. Menyelenggarakan rapat RAPBS (Madrasah, Orangtua, masyarakat) d. Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS. e. Ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala madrasah.
	2. Pelaksanaan program: <ul style="list-style-type: none"> a. Kurikulum b. PBM c. Penilaian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberi masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di madrasah. b. Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru.
	3. Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> a. SDM b. S/P c. Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat. b. Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di madrasah. c. Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat di perbantukan di madrasah. d. Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat di manfaatkan di madrasah.
Badan Pendukung (<i>Supporting agency</i>)	1. Pengelolaan Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di madrasah. b. Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di madrasah.

⁹ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, CV, 2010), hlm. 300-303

	<p>2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana</p> <p>3. Pengelolaan Anggaran</p>	<p>c. Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan di madrasah.</p> <p>a. Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di madrasah.</p> <p>b. Mobilisasi bantuan sarana dan prasarana madrasah.</p> <p>c. Mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana madrasah.</p> <p>d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana madrasah.</p> <p>a. Memantau kondisi anggaran pendidikan di madrasah.</p> <p>b. Memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di madrasah.</p> <p>c. Mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan di madrasah.</p> <p>d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di madrasah.</p>
Badan Pengontrol (<i>Controlling Agency</i>)	<p>1. Mengontrol perencanaan pendidikan di madrasah</p> <p>2. Memantau pelaksanaan pendidikan di madrasah</p>	<p>a. Mengontrol proses pengambilan keputusan di madrasah.</p> <p>b. Mengontrol kualitas kebijakan di madrasah.</p> <p>c. Mengontrol proses perencanaan pendidikan di madrasah.</p> <p>d. Pengawasan terhadap kualitas perencanaan madrasah.</p> <p>e. Pengawasan terhadap kualitas program madrasah.</p> <p>a. Memantau organisasi madrasah.</p> <p>b. Memantau penjadwalan program madrasah.</p> <p>c. Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program madrasah.</p> <p>d. Memantau sumberdaya</p>

	3. Memantau <i>output</i> pendidikan	<p>pelaksanaan program madrasah.</p> <p>e. Memantau partisipasi stakeholder pendidikan dalam pelaksanaan program madrasah.</p> <p>a. Memantau hasil ujian akhir.</p> <p>b. Memantau angka partisipasi madrasah.</p> <p>c. Memantau angka mengulang madrasah.</p> <p>d. Memantau angka bertahan di madrasah.</p>
Badan Penghubung (<i>Mediator Agency</i>)	<p>1. Perencanaan</p> <p>2. Pelaksanaan program</p> <p>3. Pengelolaan Sumber Daya pendidikan</p>	<p>a. Menjadi penghubung antara Komite Madrasah/Madrasah dengan masyarakat, Komite Madrasah dengan madrasah, dan Komite Madrasah dengan Dewan Pendidikan.</p> <p>b. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan.</p> <p>c. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada madrasah.</p> <p>a. Mensosialisasikan kebijakan dan program madrasah kepada masyarakat.</p> <p>b. Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap madrasah.</p> <p>c. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program madrasah.</p> <p>d. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap madrasah.</p> <p>a. Mengidentifikasi kondisi sumber daya di madrasah.</p> <p>b. Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat.</p>

		c. Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di madrasah.
		d. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat.

4. Struktur organisasi Komite Madrasah

a) Keanggotaan Komite Madrasah terdiri atas:¹⁰

- 1) Unsur masyarakat dapat berasal dari: Perwakilan orangtua/wali peserta didik; Perwakilan tokoh masyarakat: tokoh pendidikan (kepala madrasah, perwakilan guru), dunia usaha/industri; Organisasi profesi tenaga kependidikan; wali alumni; wakil peserta didik (dapat dipilih dari pengurus OSIS).
- 2) Unsur komite guru, yayasan/lembaga penyelenggaraan pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Madrasah (maksimal 3 orang).
- 3) Anggota Komite Madrasah, sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang, dan jumlahnya gasal.

b) Kepengurusan Komite Madrasah

- 1) Pengurus, sekurang-kurangnya terdiri atas: ketua, sekretaris, bendahara.
- 2) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.
- 3) Ketua bukan berasal dari kepala madrasah.

c) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

- 1) Komite Madrasah wajib memiliki AD dan ART.

¹⁰ Ibid, hlm. 57-58

2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud, sekurang-kurangnya memuat: Nama dan tempat kedudukan; Dasar, tujuan dan kegiatan; Keanggotaan dan kepengurusan; Hak dan Kewajiban Anggota dan pengurus; Keuangan; Mekanisme kerja dan rapat-rapat; Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.

5. Pembentukan Komite Madrasah

Pembentukan komite madrasah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa komite madrasah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Sedangkan dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerjanya maupun penggunaan dan kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat.¹¹

a) Prinsip Pembentukan Komite Madrasah:¹²

Pembentukan Komite Madrasah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Transparan, akuntabel, dan demokratis.
- 2) Merupakan mitra madrasah.

¹¹Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 99

¹² Ibid, hlm. 58-59

b) Mekanisme pembentukan:

1) Pembentukan Panitia Persiapan

(a) Masyarakat dan/atau madrasah membentuk panitia persiapan.

Panitia persiapan berjumlah, sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala madrasah, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orangtua peserta didik.

(b) Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Madrasah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3, Komite Madrasah, dan Komite Madrasah yang sudah ada) tentang Komite Madrasah menurut keputusan ini.
- (2) Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
- (3) Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
- (4) Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat.
- (5) Menyusun nama-nama anggota terpilih.
- (6) Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Madrasah.

(7) Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Madrasah kepada kepala madrasah.

(c) Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Madrasah terbentuk.

2) Penetapan Pembentukan Komite Madrasah

Komite Madrasah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala madrasah, dan selanjutnya diatur di dalam AD dan ART.

6. Dasar Hukum Pembentukan Komite Madrasah

Dasar hukum dalam penyelenggaraan Komite Madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas (Program Pembangunan Nasional).
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 Tahun 2002. Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah.
- d. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. DJ. II/409/2003 tentang Pedoman Pembentukan Komite Madrasah.¹³

7. Komite Madrasah dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama yang mencintai kebersamaan, kerukunan dan perdamaian dalam setiap hal, keadaan dan dimana saja. Terlebih dalam masalah pemerintahan dan pendidikan yang merupakan sendi-sendi dakwah

¹³ Departemen Agama RI, *Pedoman Komite Madrasah* (Jakarta:DEPAG RI, 2003), hlm. 7

Islam. Oleh karena itu Islam mempunyai konsep musyawarah untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama. Sehingga setiap pihak dapat saling menerima, memahami dan mau menjalankan keputusan yang telah ditetapkan bersama. Allah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]47. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”. (Ali-Imran:159).¹⁴

Dalam ayat di atas, “syura” atau “musyawarah” sebagai sifat ketiga bagi masyarakat Islam dituturkan sesudah iman dan shalat. Menurut Taufiq asy- Syawi, hal ini memberi pengertian bahwa musyawarah mempunyai martabat sesudah ibadah terpenting, yaitu shalat, sekaligus memberikan pengertian bahwa musyawarah merupakan salah satu ibadah yang tingkatannya sama dengan shalat dan zakat. Maka masyarakat yang mengabaikannya dianggap sebagai masyarakat yang tidak menepati salah satu ibadah. ‘Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa musyawarah adalah hak ummat dan kewajiban [246] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal

¹⁴ Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Menara Kudus 1993), hlm. 72.

duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Imam atau pemimpin, dalilnya adalah firman Allah SWT yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat.¹⁵

Begitu juga dengan Komite Madrasah, keberadaannya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS). Selanjutnya demi memudahkan masyarakat dalam membentuk Komite Madrasah, Menteri Pendidikan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 dan diperkuat dengan aspek legal karena dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Keputusan dan undang-undang yang telah ditetapkan itu adalah hasil musyawarah yang mencapai mufakat.¹⁶

Oleh karena itu, ketika telah tercipta kerjasama yang baik, maka komite madrasah juga dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah. Hal itu dilakukan dengan menjalin kerjasama antar madrasah, instansi pemerintah dan masyarakat luas, sehingga tercipta sebuah mata rantai yang utuh dari kebutuhan masyarakat terhadap madrasah dan kebutuhan madrasah terhadap masyarakat, dengan demikian terwujud suasana yang dinamis dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah. Bahkan tidak hanya sekedar

¹⁵ Abdul Qaadir Haamid, Tijani, *Pemikiran Politik dalam Islam*; Terj., Abdul Hayyie al-Kattani dkk dari *Ushulul Fikris-Siyaasi fil-Qur'aanil-Makki* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2007), hlm. 103

¹⁶ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008), hlm. 260

teori dan wacana, komite madrasah juga telah dapat membantu melengkapi kebutuhan madrasah secara finansial.

B. Sejarah Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)

1. Sejarah dan Konsep MBM

Merujuk pada Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Di sisi lain, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dua landasan normatif tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi rambu-rambu bagi pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Akan tetapi, perlu juga adanya standarisasi dan pengendalian mutu secara nasional sebagai Peran membentuk kesatuan “referensi” dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Standar pendidikan ini telah diperkuat dengan adanya PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.¹⁷

Munculnya Manajemen Berbasis Madrasah/Manajemen Berbasis Madrasah pada mulanya karena didorong oleh keinginan daerah untuk memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur daerahnya sendiri. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disahkan pada 7 Mei 1999 serta pelaksanaannya resmi dimulai pada 1

¹⁷Umiarso dan Imam Gojali, *Manajemen Mutu Madrasah di Era Otonomi Pendidikan*, (Jogjakarta:IRCiSoD, 2010), hlm.68

Januari 2001 telah menetapkan kewenangan dengan mengutamakan asas desentralisasi, termasuk dalam urusan pendidikan. Pasal 11 ayat (2) UU tahun 1999 mengisyaratkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Otonomi meliputi: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Dengan demikian, jelas bahwa pengelolaan masalah pendidikan secara luas menjadi kewenangan daerah.¹⁸

Dengan lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999, maka dapat kita maklumi akan memunculkan reformulasi penyelenggaraan manajemen pendidikan tidak hanya pada jenjang SD, namun pada semua jenjang pendidikan. sehingga, wewenang Departemen Pendidikan Nasional (Diknas), Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama (bidang pendidikan agama) serta serta Departemen atau Instansi lain penyelenggara pendidikan, untuk berikutnya dilimpahkan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Bahkan wewenang tersebut akan mencakup dalam penyelenggaraan satuan-satuan pendidikan pada masing-masing lembaga. Dari lahirnya pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan pendidikan pada satuan-satuan pendidikan (madrasah) tersebut, muncullah, konsep Manajemen Berbasis Madrasah.¹⁹

Konsep Manajemen Berbasis Madrasah pada hakekatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh madrasah

235 ¹⁸ Mulyono, *Manajemen Administrasi*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA:2008), hlm. 234-

¹⁹ Mulyono, *Manajemen Administrasi*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA:2008), hlm. 235-236

dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (*stakeholder*) yang berkaitan dengan madrasah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu madrasah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.²⁰

Manajemen Berbasis Madrasah merupakan salah satu pendekatan yang digunakan *school based management*, yang pada dasarnya merupakan pemberian kesempatan yang lebih luas kepada madrasah dalam pengelolaan madrasah. Madrasah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola madrasah secara mandiri sesuai dengan kondisi madrasah. Kegiatan pengelolaan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi banyak di tentukan oleh madrasah. Dengan demikian diharapkan madrasah bisa mampu mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki madrasah dan tuntutan lingkungan masyarakat.²¹

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Manajemen Berbasis Madrasah diartikan sebagai bentuk alternatif pengelolaan madrasah dalam rangka desentralisasi pendidikan, yang ditandai dengan adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat madrasah, partisipasi masyarakat yang relatif tinggi, dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Keleluasaan pengambilan keputusan di tingkat madrasah dimaksudkan agar madrasah dapat

²⁰Sri Minarti, *Manajemen Madrasah(Mengelola Lembaga Pendidikan secara mandiri)*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), hlm. 44-45

²¹ Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimoinan Kepala Madrasah*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 50

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas program serta lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat yang di tunjang dengan sistem pengelolaan yang baik.²²

Definisi yang lebih luas tentang MBM di kemukakan oleh Wohlstetter dan Mohrman yaitu sebuah pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi madrasah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan madrasah pada tingkat tingkat lokal guna memajukan madrasahny. Partisipan lokal madrasah tak lain adalah kepala madrasah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orangtua siswa, masyarakat sekitar dan siswa.²³

Pada umumnya MBM dimaknai sebagai berikut:

(1) Dalam rangka MBM alokasi dana kelapa madrasah menjadi lebih besar dan sumber dana tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan madrasah sendiri. (2) madrasah lebih bertanggung jawab terhadap perawatan, kebersihan, dan penggunaan fasilitas madrasah, termasuk pengadaan buku dan bahan ajar. Hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas. (3) madrasah membuat perencanaan sendiri dan mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan masyarakat sekitarnya dalam proses tersebut. (4) MBM menciptakan rasa tanggung jawab melalui

²² Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Madrasah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 50-51

²³ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO Persada), hlm. 67-68

administrasi madrasah yang lebih terbuka. Kepala madrasah, guru, dan anggota masyarakat bekerja sama dengan baik untuk membuat Rencana Pengembangan Madrasah (RPS). Madrasah memanjangkan anggaran madrasah dan perhitungan dana secara terbuka pada papan madrasah.²⁴

Tabel II : Ciri-ciri Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)²⁵

Kemampuan Madrasah	Kepala Madrasah dan Guru	Partisipasi Masyarakat	Pendapatan Daerah dan Orangtua	Anggaran Madrasah
Madrasah dengan kemampuan manajemen tinggi	Kepala madrasah dan guru berkompotensi tinggi (termasuk kepemimpinan)	Partisipasi masyarakat tinggi (termasuk dukungan dana)	Pendapatan daerah dan orangtua tinggi	Anggaran madrasah di luar anggaran pemerintah besar.
Madrasah dengan kemampuan manajemen sedang	Kepala Madrasah dan guru berkompotensi sedang (termasuk kepemimpinan)	Partisipasi masyarakat sedang (termasuk dukungan dana)	Pendapatan daerah dan orangtua sedang	Anggaran madrasah di luar anggaran pemerintah sedang.
Madrasah dengan kemampuan manajemen rendah	Kepala Madrasah dan guru berkompotensi rendah (termasuk kepemimpinan)	Partisipasi masyarakat kurang (termasuk dukungan dana)	Pendapatan daerah dan orangtua rendah	Anggaran madrasah di luar anggaran pemerintah kecil atau tidakada.

Kondisi diatas mengisyaratkan bahwa tingkat kemampuan manajemen madrasah untuk mengaplikasikan Manajemen Berbasis Madrasah berbeda antara satu sama lainnya. Hal tersebut sesuai dengan

²⁴Hasbullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO Persada), hlm. 69-70

²⁵Sri Minarti, *Manajemen Madrasah Mengelola Lembaga Pendidikan secara mandiri* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), hlm.46-47

tingkat kemampuan masing-masing dalam menyerap paradigma baru yang di tawarkan MBM. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban melakukan peran-peran maksimal untuk mempersiapkan pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah.

2. Tujuan dan manfaat Manajemen Berbasis Madrasah

Tujuan umum Manajemen Berbasis Madrasah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan madrasah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada madrasah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada madrasah untuk mengelola sumber daya madrasah dan mendorong partisipasi warga madrasah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.²⁶

Menurut Kustini Hardi, ada tiga tujuan diterapkannya Manajemen Berbasis Madrasah, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Mengembangkan kemampuan kepala madrasah bersama guru dan unsur komite madrasah dalam aspek Manajemen Berbasis Madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah.
- b. Mengembangkan kemampuan kepala madrasah bersama guru dan unsur komite madrasah dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di madrasah maupun di lingkungan masyarakat setempat.

²⁶Sri Minarti, *Manajemen Madrasah* Mengelola Lembaga Pendidikan secara mandiri (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), hlm. 69

²⁷ Ibid

- c. Mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum permadrasah dari unsur komite madrasah dalam membantu peningkatan mutu madrasah.

Manajemen Berbasis Madrasah itu sendiri, mempunyai tujuan agar madrasah lebih mandiri atau memberdayakan madrasah melalui pemberian kewenangan atau sering disebut dengan otonomi. Fleksibilitas yang lebih besar kepada madrasah dalam mengelola sumber daya. Dan mendorong partisipasi warga madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan secara khusus, adapun tujuan dari penerapan Manajemen Berbasis Madrasah adalah:²⁸

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, inisiatif madrasah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan yang tersedia.
- b. Meningkatkan kepedulian warga madrasah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
- c. Meningkatkan tanggung jawab madrasah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu madrasah.
- d. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Manajemen Berbasis Madrasah adalah peningkatan mutu pendidikan, yakni dengan

²⁸Hadiyanto, *Mencari sosok desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta:PT RINEKA CIPTA, 2004), hlm. 71

mendirikan madrasah untuk mengelola lembaga bersama pihak-pihak terkait (guru, peserta didik, masyarakat, wali siswa, dan instansi lain) sehingga madrasah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu intruksi dari atas dalam mengambil langkah-langkah untuk memajukan pendidikan. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri.

Sedangkan Manfaat Manajemen Berbasis Madrasah menurut pandangan Emam Suparman bahwa dengan menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah, beberapa manfaat yang bisa diraih, yaitu:²⁹

- a. Madrasah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya di bandingkan dengan lembaga-lembaga lain.
- b. Dengan demikian, madrasah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya.
- c. Madrasah lebih mengetahui sumber daya yang dimilikinya dan input pendidikan yang akan dikembangkan serta didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- d. Madrasah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orangtua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya sehingga madrasah akan berperan semaksimal mungkin untuk

²⁹ Mulyono, *Manajemen Administrasi*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA:2008), hlm. 245-246

melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.

- e. Madrasah dapat melakukan persaingan sehat dengan madrasah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peran-peran inovatif dengan dukungan orangtua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.

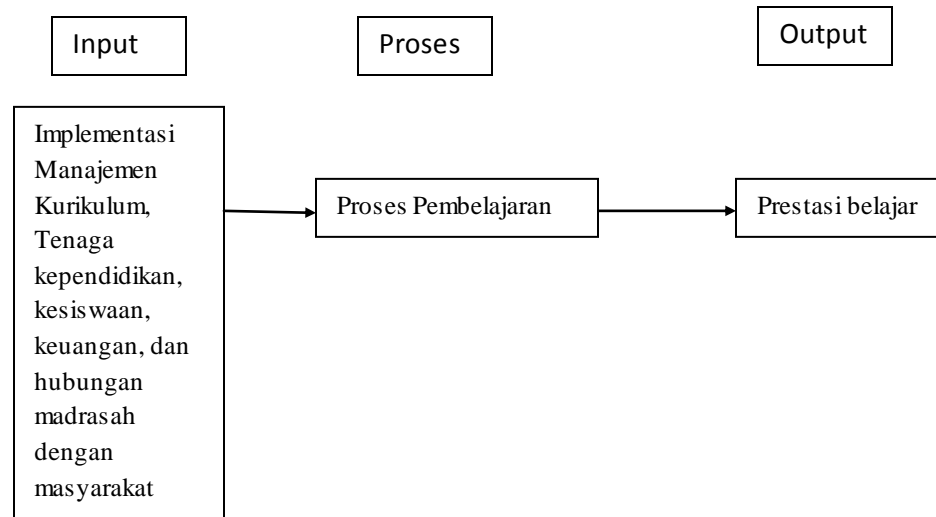
Menurut E. Mulyasa manfaat Manajemen Berbasis Madrasah adalah memberikan kebebasan dan kekuatan yang besar kepada kepala madrasah beserta seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumberdaya dan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Oleh karena itu, Manajemen Berbasis Madrasah mendorong profesionalisme guru dan kepala madrasah sebagai pembimbing pendidikan di madrasah. Melalui penyusunan kurikulum efektif, rasa tanggap madrasah terhadap kebutuhan setempat meningkatkan dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat madrasah. Prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orangtua.³⁰

3. Perlunya Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah

Adapun komponen yang didesentralisasikan adalah manajemen kurikulum, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, serta manajemen hubungan madrasah dengan

³⁰ Mulyono, *Manajemen Administrasi*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA:2008), hlm. 247-248

masyarakat. Adapun yang dimaksud tersebut dapat dilihat pada skema dibawah ini.



Tabel III. Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM).³¹

Dalam hal ini, bukan hanya instansi bersifat komersial saja yang dituntut untuk berkompetisi, akan tetapi lembaga pendidikan juga dituntut untuk bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain guna menawarkan jasa yang mempunyai kesesuaian dan keserasian dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus mempunyai sistem manajemen pendidikan yang baik dan mapan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai mana diuraikan mengenai komponen Manajemen Berbasis Madrasah sebagai berikut.³²

a. Implementasi Manajemen Kurikulum

Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa kurikulum yang baik semestinya akan menghasilkan proses dan produk pendidikan yang baik.

³¹ Sri Minarti, *Manajemen Madrasah (Mengelola Lembaga Pendidikan secara mandiri)*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), hlm. 77

³² Umarso dan Imam Gojali, *Manajemen Mutu Madrasah di Era Otonomi Pendidikan*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), hlm.85-105

Sebaliknya, kurikulum yang buruk akan membuahkan proses dan hasil pendidikan yang tidak baik.

Manajemen kurikulum meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang bertujuan agar seluruh kegiatan pembelajaran terlaksana berhasil guna dan berdaya guna dalam dunia pendidikan.

b. Implementasi Manajemen Tenaga kependidikan

Manajemen tenaga kependidikan harus dilaksanakan oleh kepala madrasah, adalah menarik, mengembangkan, menggaji dan memotivasi tenaga kependidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara optimal, membantu tenaga kependidikan mencapai posisi dan standar perilaku, menyelaraskan tujuan individu, kelompok dan organisasi.

c. Implementasi Manajemen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan bertujuan mengatur sebagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di madrasah dapat berjalan dengan lancar dalam mencapai tujuan pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang kesiswaan sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan siswa baru, kegiatan kemajuan belajar (pengelolaan proses pembelajaran), serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

d. Implementasi Manajemen Keuangan

Dalam garis besarnya, pembiayaan madrasah mencakup hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya personal dan biaya operasi. *Kedua*, biaya investasi

meliputi biaya pembelian sarana dan prasarana, pengembangan SDM. *Ketiga*, biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. *Keempat*, biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. *Kelima*, standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

e. Implementasi Manajemen Hubungan madrasah dengan masyarakat

Pendidikan merupakan wilayah kerja madrasah menjadi tanggung jawab bersama tiga elemen, yaitu orangtua, masyarakat, dan pemerintah. Hal itu dikuatkan secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 7 ,8 ,9 ,10 , dan 11 tentang hak dan kewajiban orangtua, masyarakat, dan pemerintah terhadap pendidikan.

Diharapkan dengan menerapkan manajemen pola Madrasah lebih berdaya dalam beberapa hal berikut:³³

- a) Menyadari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi madrasah tersebut.
- b) Mengetahui sumberdaya yang aktual dan potensional sebagai masukan pendidikan yang akan dikembangkan.
- c) Mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya.

³³ Direktorat Pendidikan Madrasah, Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta:2009), hlm. 30-31

- d) Bertanggungjawab terhadap orangtua, masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah dalam penyelenggaraa madrasah.
- e) Persaingan sehat dengan madrasah lain dalam usaha-usaha kreatif inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan.
- f) Meningkatkan peran komite madrasah, masyarakat, Dunia Usaha Dan Dunia Industri (DUDI) untuk mendukung kinerja Madrasah.
- g) Meningkatnya kemandirian Madrasah di segala bidang.
- h) Ada keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program Madrasah (Misal: Kepala Madrasah, Pendidik, Komite Madrasah, Tokoh Masyarakat, dll).
- i) Adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan Madrasah.

4. Komponen dan Aspek-Aspek MBM

Pada hakekatnya tujuan utama MBM adalah efisiensi, peningkatan mutu, dan pemerataan pendidikan. Semua itu dapat di peroleh dari adanya keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, partisipasi orangtua, kelenturan pengelolaan madrasah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol dan penyederhanaan birokrasi.

Dari situ dapat difahami bahwa adanya MBM adalah meningkatkan mutu pembelajaran, yang meliputi komponen-komponen utama. Komponen tersebut antara lain:

1. Kepala Madrasah
2. Guru

3. Siswa
4. Staf/karyawan
5. Peran serta masyarakat dan orangtua
6. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.³⁴

Konteks manajemen pendidikan menurut MBM berbeda dari manajemen pendidikan sebelumnya yang semua serba diatur dari pemerintah pusat. Sebaliknya, manajemen pendidikan model MBM ini berpusat pada sumber daya yang dimiliki oleh madrasah itu sendiri. Komponen madrasah yang melaksanakan MBM dapat dilihat beberapa hal penting sebagai berikut:³⁵

a) Komite Madrasah

Komite Madrasah adalah mitra penyelenggara madrasah khususnya Yayasan dan Pimpinan Madrasah dalam melaksanakan pelayanan dan proses pembelajaran serta melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan dengan warga masyarakat.

b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Madrasah (RPJMM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Madrasah (RPTM).

Madrasah yang menerapkan MBM akan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Madrasah (RPJMM) yang memuat visi, misi, strategi dan tujuan jangka menengah pembangunan dan perkembangan madrasah termasuk rencana anggaran pendapatan belanja selama 5 tahun.

³⁴ <http://fkip-unpak.org/suprpto.htm>

³⁵ Direktorat Pendidikan Madrasah, Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta:2009), hlm. 31-34

- c) Adanya sistem keterbukaan (transparansi) dan pertanggung jawaban (akuntabilitas).

MBM mempunyai sistem pertanggungjawaban terbuka, akuntabel, berkelanjutan, dan dapat diketahui oleh semua pihak. Pertanggungjawaban ini dapat melalui pelaporan, pertemuan koordinasi dan cara lainnya yang disepakati oleh pemangku kepentingan, seperti hal berikut:

- a) Kemandirian

Kemandirian dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan dengan melibatkan atau partisipasi semua yang berkepentingan dengan madrasah secara demokratis.

- b) Pembagian kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab.

Pembagian kekuasaan atau wewenang dan tanggungjawab yang di bagi secara habis dan tidak tumpang tindih, secara proporsional dan profesional. Bertujuan untuk mengatur kerjasama dan mekanisme hubungan yang setara, kreatif dan produktif dan menghindari konflik sedini mungkin.

- c) Pengembangan kurikulum dan pengajaran

Madrasah dengan pola MBM akan mempunyai otonomi dalam pengembangan kurikulum lokal yang berbasiskan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, akan tetapi tetap dalam kerangka nasional. Karena Kurikulum Nasional adalah acuan minimal (bukan maksimal), oleh karena itu madrasah harus mengembangkan

kurikulumnya lebih luas dan mendalam dengan melihat kapasitas peserta didik untuk belajar.

d) Pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional

Madrasah yang menerapkan pola MBM harus mempunyai pendidik yang profesional yang melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan memperhatikan etika profesinya, mempunyai keilmuan dan penguasaan dalam bidang ilmu dll.

5. Karakteristik MBM

Apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat Madrasah, maka MBM akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di mana madrasah itu berada. Ciri-ciri MBM bisa dilihat dari sudut sejauh mana Madrasah tersebut dapat mengoptimalkan kinerja organisasi Madrasah, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), proses belajar mengajar, sumber daya, dan dukungan masyarakat setempat sebagaimana di gambarkan dalam tabel berikut:³⁶

Tabel IV : Ciri-ciri madrasah yang melaksanakan MBM

Organisasi Madrasah	Proses Belajar Mengajar	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya dan Administrasi
Menyediakan manajemen atau organisasi atau kepemimpinan transformasional dalam	Meningkatkan kualitas belajar siswa	Memberdayakan staf dan menempatkan personel yang dapat melayani keperluan Siswa	Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut. Sesuai

³⁶ Direktorat Pendidikan Madrasah, Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta:2009), hlm. 14-15

mencapai tujuan madrasah			dengan kebutuhan
Menyusun rencana Madrasah dan merumuskan kebijakan untuk Madrasah sendiri	Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat	Memiliki staf dengan wawasan MBM	Mengelola Dana Madrasah secara efektif dan efisien Akuntabilitas keuangan dan administrasi
Mengelola kegiatan operasional Madrasah	Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif	Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf	Menyediakan dukungan administratif
Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara Madrasah dan masyarakat	Menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa	Menjamin kesejahteraan staf dan siswa	Mengelola dan memelihara gedung dan sarana.
Menggerakkan partisipasi masyarakat	Berperanserta memotivasi siswa berperan serta dalam menetapkan kurikulum muatan local	Menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas kemajuan kinerja Madrasah	Partisipasi dalam penelusuran pembiayaan dan pengawasan penggunaan sumber daya.
Menjamin terpeliharanya Madrasah yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah	Mendorong kreatifitas dan inovasi dan bertanggung jawab		

Dikembangkan berdasarkan Focus on school: The Future Organization of Education Service for student, Departement of Education, Queensland, Australia.

Tabel V : Tipe Model Masdrasah yang menjalankan MBM

	Syarat 1	Syarat 2	Syarat 3	Syarat 4
--	----------	----------	----------	----------

Tipe Madrasah	Pemilihan Kepsek dan Guru	Bentuk partisipasi masyarakat	Lokasi/ kemampuan daerah dan orangtua	Kemampuan menghimpun dana
1. Penuh	Dipilih karena memiliki keterampilan	Partisipasi masyarakat besar dan dana	Pendapatan daerah tinggi	Dana tak bergantung pada pemerintah, tapi dari masyarakat
2. Menengah	Dipilih karena memiliki keterampilan	Partisipasi masyarakat besar dan dana	Pendapatan daerah sedang	Tergantung pada dana pemerintah
3. Minimal	Dipilih karena memiliki keterampilan	Partisipasi masyarakat kurang	Pendapatan daerah rendah	Sangat tergantung pada dana pemerintah

Karakteristik MBM bisa diketahui antara lain, bagaimana madrasah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi madrasah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan administrasi.³⁷

6. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pada pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah

Banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran di bawah atau masyarakat. Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi terinci sebagai berikut:³⁸

³⁷ Dadang Dally, *Balanced Score Card* "Suatu pendekatan dalam implementasi Manajemen Berbasis Madrasah" (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2010), hlm. 23

³⁸ Direktorat Pendidikan Madrasah, Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta:2009), hlm. 12-13

- (1) Ketersediaan Sumber Daya dan SDM berkualitas, dan perlunya partisipasi masyarakat.
- (2) Kegagalan pembagian kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Munculnya kebutuhan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
- (4) Kebutuhan keluaran pendidikan yang siap untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya.
- (5) Munculnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- (6) Tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat.
- (7) Tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan pendidikan untuk turut serta mengontrol madrasah dan menilai kualitas pendidikan.
- (8) Anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa madrasah.

Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan lembaga pendidikan diantaranya adalah:

a. Pendidik

Keadaan guru yaitu kesehatan, sosiologis, psikologis, serta kesejahteraan sosial yang dapat mempengaruhi kemajuan pelaksanaan tugas guru, iklim sosial psikologis yang tidak tentram.

b. Dana dan Sarana prasarana

Kurangnya pendanaan dan sarana prasarana adalah merupakan permasalahan pendidikan di Indonesia. Banyak lembaga pendidikan yang dalam pengembangannya kurang lancar karena disebabkan kurangnya masalah pendanaan dan sarana prasarana.

c. Partisipasi Masyarakat

Bantuan dan kesadaran masyarakat atau orangtua siswa yang makin tinggi, maka hal ini mengutamakan bantuan yang bersifat material dan juga bantuan moral, perlengkapan infestasi, tenaga pendidik dan lain-lain.³⁹

7. Acuan Standar Pengelolaan Madrasah

Dalam penyelenggaraan atau pengelolaan madrasah, semua penyelenggara madrasah harus mengacu pada peraturan dan perundang-undang yang berlaku dalam pelaksanaan MBM antara lain adalah :

- a) UU No. 20/2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) PP No. 19 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar, tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c) Permen Diknas No.19 Tahun 2007
- d) Permen Diknas No.12 Tahun 2009 tentang kriteria dan perangkat akreditasi (SMP/MTs).

³⁹ Tim Dosen FIP IKIP Malang, *Pengantar Dasar-dasar Kependidikan* (Malang, usaha nasional, 2003), hlm. 110

8. MBM dalam Perspektif Islam

Dengan mengutip pendapat Edmon, Umaedi mengatakan bahwa adanya indikator yang menunjukkan dari konsep manajemen berbasis madrasah, antara lain:⁴⁰

- a) Lingkungan madrasah / madrasah yang aman dan tertib
- b) Madrasah / madrasah memiliki visi dan mutu yang ingin di capai.

Seseorang tidak boleh bekerja dengan *sebrono* (seenaknya) dan acuh tak acuh, sebab akan berarti merendahkan makna demi ridha Allah atau merendahkan Tuhan. Di jelaskan dalam Quran Surat Al- Kahfi :110:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".

Maksud dari kata “amal sholeh” dalam ayat di atas adalah bekerja dengan baik (bermutu), sedangkan kata “Janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya” berarti tidak mengalihkan tujuan pekerjaan selain kepada Tuhan (*Al Haqq*), yang menjadi sumber nilai pekerjaan manusia.⁴¹

⁴⁰ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*” (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), hlm. 197

⁴¹ Muhaimin, *Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam mengembangkan budaya mutu*”(Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), hlm. 80

Selain itu, dijelaskan bahwa karakteristik madrasah yang efektif dapat melalui proses antara lain:⁴²

- a) Perencanaan kolaboratif dan hubungan kesejawatan serta harus bekerja secara efektif dan efisien atau mempunyai daya guna yang setinggi-tingginya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al- Sajadah : 7 :

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾

Artinya : Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

- b) Penentuan tujuan dan harapan madrasah secara jelas, yang didasarkan pada penilaian diri (*self-evaluation*). Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Najm : 39:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

- c) Seorang harus bekerja secara optimal dan komitmen terhadap proses dan hasil kerja yang bermutu atau sebaik mungkin, selaras dengan ajaran ihsan. Hal tersebut di jelaskan dalam Quran Surat An-Nahl : 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

⁴² Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), hlm. 200-201

Sehingga uraian di atas menunjukkan kepada kita tentang meningkatkan kualitas pendidikan yang diinginkan dan sesuai dengan konsep Manajemen Berbasis Madrasah, yang intinya memerlukan komitmen, kesungguhan dan kesediaan untuk bekerja sama dari semua pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan. Karena itu, penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) pada madrasah harus siap, tidak semata-mata hanya sekedar bersifat legal formal yang lebih banyak bersifat politis, tetapi yang lebih penting adalah kesiapan teknis untuk menjalankan model pengelolaan tersebut.⁴³

⁴³ Ibid

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang “Peran komite sekolah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan” untuk meningkatkan daya nalar dan mencari jawaban permasalahan itu melalui penelitian. Penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.¹

Karena peneliti melaporkan hasil penelitian tentang Peran Komite Madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, kemudian mendeskripsikan dan memadukan dengan konsepsi teori yang ada, maka pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis *deskriptif kualitatif*, yaitu pengumpulan data, informasi atau keterangan langsung tentang hal-hal yang secara luas ada hubungannya dengan komite madrasah.

Dalam pendekatan kualitatif, data-data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis, ucapan lisan, bentuk perilaku yang dapat diamati melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti menganalisis dengan cara metode kualitatif.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian *Deskriptif Kualitatif*. Menurut Husein Umar, jenis penelitian ini merupakan penelitian yang rinci

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 5

mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya.

Peneliti memilih jenis penelitian *Deskriptif Kualitatif* karena penelitian tentang peran komite madrasah dalam mendukung MBM MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan tidak hanya cukup dengan kajian teori tentang komite madrasah dan MBM saja, perlu penelitian langsung ke lokasi yang diteliti, yang dikenal dengan istilah observasi dan menggunakan pendekatan yang sistematis yang disebut kualitatif. Dengan demikian data konkrit dari data primer dan sekunder benar-benar dapat dipertanggung jawabkan sebagai kesimpulan akhir dari hasil penelitian.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain: ilmiah, manusia sebagai *instrument*, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya fokus, adanya kriteria untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.²

Sebagaimana disebutkan Nasution penelitian kualitatif Memiliki karakteristik tertentu yang meliputi: pertama, dalam mengadakan penelitian sejak awal peneliti sebagai instrumen penelitian atau alat penelitian utama, ciri kedua dalam menghasilkan data yang diperoleh dalam penelitian bersifat deskriptif dan diuraikan dengan laporan atau uraian, ciri ketiga mementingkan proses dalam penelitian maupun produk, jadi juga

² *Ibid*, hlm. 27

mempertimbangkan bagaimana perkembangan terjadinya sesuatu, ciri keempat mengutamakan data langsung atau "*first hand*". Untuk itu peneliti sendiri yang terjun ke lapangan untuk mengadakan observasi atau wawancara, ciri ke lima mementingkan pandangan responden, yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dari segi pendiriannya.³

Faisal menyebutkan bahwa pada penelitian kualitatif yang dipentingkan bukanlah kuantifikasi akan tetapi kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji. Oleh karena itu, data yang dikaji merupakan data yang tidak menggunakan rumus-rumus statistik melainkan data yang berbentuk deskriptif secara alamiah. Penggunaan Penelitian kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan dan memadukan antara konsepsi teori dengan penelitian tentang Peran Komite Madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah yang diperoleh bersifat alamiah.

Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan realita empirik dari fenomena-fenomena yang dibiarkan terbuka dan muncul untuk dipahami dan dimaknai berdasarkan interpretasi penulis, kemudian data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, meliputi deskripsi yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam (*depthinterview*) hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan argumen-argumen yang dikeluarkan oleh komponen-komponen madrasah terhadap

³Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan*, (Bandung:Mandar Maju, 2007), hlm. 15-18

peran komite madrasah, apakah sudah sesuai dengan apa yang digariskan pemerintah atau adakah pengembangan yang dilakukan untuk menyempurnakan peran komite madrasah atau bahkan peran komite madrasah tidak berpengaruh dalam pengembangan madrasah karena adanya kendala-kendala yang dihadapi komite madrasah.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui fenomena yang terjadi di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan berkaitan dengan peran komite madrasah dalam mendukung MBM dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Dengan menggunakan landasan berpikir fenomenologis, penulis berharap akan memperoleh data dari objek yang diteliti. Bagi objek manusia, gejala dapat berupa mimik wajah, ucapan, tingkah laku, perbuatan dan lain-lain, sehingga peneliti tinggal memberikan interpretasi terhadap gejala-gejala tersebut.⁴

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama atau disebut instrumen. Dalam hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Moleong Lexy bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Pengertian *instrument* atau

⁴Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 81

alat penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.⁵

Berdasarkan pada pandangan diatas, maka pada dasarnya kehadiran peneliti sangat diperlukan, karena selain sebagai *instrument* peneliti berfungsi sebagai pengumpul data menggunakan berbagai metode dengan memperluas dan meningkatkan pengetahuannya berdasarkan pengalamannya penelitian juga menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan penelitian ini. Karena kedalaman dan ketajaman dalam menganalisis data tergantung pada peneliti.

Dalam hal ini, peneliti telah membuat perencanaan penelitian yang sistematis, mengidentifikasi masalah tentang Komite Madrasah dan MBM, menentukan tujuan dan obyek penelitian, mengumpulkan data tertulis dari administrasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, menyusun pertanyaan interview dan mengamati kegiatan-kegiatan yang terjadi di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, selanjutnya dianalisis, ditafsirkan dan dideskripsikan dalam bentuk laporan penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Ma'arif Sukorejo Pasuruan, tepatnya di Jl. Kamajaya Teks No. 96 Sukorejo Pasuruan.

⁵ Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.168

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan kepada pada pertimbangan bahwa MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan adalah salah satu madrasah meskipun berstatus swasta akan tetapi menghasilkan input dan outputnya berkualitas dan telah memiliki organisasi Komite Madrasah sejak tahun 2003.

Keberadaan Komite Madrasah menjadi sangat penting dalam mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Selain karena memang Komite Madrasah harus ada di setiap satuan pendidikan sesuai dengan undang-undang pendidikan nasional, Komite Madrasah juga difungsikan sebagai forum pengambilan keputusan bersama antar madrasah dan masyarakat dalam hal perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program kerja yang dilakukan Madrasah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama yang berupa deskripsi kata-kata hasil wawancara dan tindakan Peran Komite Madrasah dalam mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Sedangkan sumber data tambahan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Komite Madrasah dalam mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Sumber dan jenis data terdiri dari data dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto.⁶ Sehingga beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

⁶ *Ibid*, hlm. 112

1. Sumber data utama (*primer*), yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi. Sumber data tersebut meliputi:

- a) Kepala Madrasah (melalui wawancara).
- b) Ketua Komite Madrasah (melalui wawancara).
- c) Anggota Komite Madrasah (melalui wawancara).

Sebagaimana yang diungkapkan Moleong bahwa, Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber utama dicatat melalui catatan tertulis dan melalui perekaman video atau audio tape, pengambilan foto atau film, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta sehingga merupakan hasil utama gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.⁷

2. Sumber data tambahan (sekunder), yaitu sumber data di luar kata-kata dan tindakan yakni sumber data tertulis, antara lain:

- a) Profil MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.
- b) Struktur organisasi lembaga MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan
- c) Struktur Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan
- d) AD/ART Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan
- e) Data guru dan pegawai
- f) Data siswa aktif dan lulusan
- g) Data prestasi siswa MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan
- h) Data sarana prasarana MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

⁷ *Ibid*, hlm.112

- i) Kajian, teori atau konsep yang berkenaan dengan MBM dan komite madrasah, baik berupa buku, jurnal, artikel, opini, majalah, website dan karya tulis lainnya.

Sumber data utama yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah dan Ketua Komite Madrasah, yang nantinya akan memberikan pengarahan kepada peneliti dalam pengambilan sumber data, dan memberikan informasi serta rekomendasi kepada informan lainnya seperti waka humas, guru mata pelajaran, dan lain-lainnya. Sehingga semua data-data yang diperlukan peneliti terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tiga metode yaitu (1) metode Observasi (2) metode interview (3) metode Dokumentasi.

1. Metode *Observasi (pengamatan)*

Metode *Observasi atau pengamatan* adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Kegiatan tersebut dapat berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa belajar, kepala madrasah yang sedang memberi pengarahan atau personil kepegawaian yang sedang rapat.⁸ Sedangkan Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa observasi atau disebut juga

⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 220.

dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan segala indera.⁹

Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung di lapangan, terutama tentang:

- a) Letak geografis serta keadaan fisik MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.
- b) Pengelolaan Madrasah dan Komite Madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.
- c) Kegiatan pembelajaran di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.
- d) Fasilitas atau sarana-prasana pendidikan yang ada di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

2. Metode interview (wawancara)

Metode *Interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Yaitu, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Jadi, peneliti mengumpulkan data dengan cara mewawancarai secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, terutama yang terkait dalam permasalahan penelitian ini seperti wawancara kepada Komite Madrasah dalam mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

Dalam metode *interview* peneliti memakai pedoman wawancara berstruktur. Dalam wawancara berstruktur semua pertanyaan telah

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 120.

dirumuskan dengan cermat tertulis sehingga pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan itu sewaktu melakukan *interview* itu atau jika mungkin menghafalkan di luar kepala agar percakapan lebih lancar dan wajar.¹⁰ Wawancara dilakukan terhadap Kepala madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, ketua Komite Madrasah, dan anggota Komite Madrasah.

3. Metode *Dokumentasi*

Metode *Dokumentasi* Merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.¹¹ Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan penulisan, sumber datanya tetap tidak berubah dan dapat dilihat kembali sebagai rujukan. Dengan metode dokumentasi, yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.¹²

Dokumentasi yang peneliti gunakan adalah dengan mengumpulkan data yang ada di kantor MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, tepatnya diperoleh dari bagian tata usaha (TU) dan dari sekretaris Komite Madrasah, baik berupa tulisan (data siswa, guru, fasilitas), gambar (struktur organisasi), profil, brosur MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dan dokumen terkait lainnya.

¹⁰ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.117

¹¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 221.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.206

F. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan pengolahan dengan proses *editing*, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya.

Secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh, dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah diperoleh adalah dengan cara deskriptif (*non statistik*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dari MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dengan kata-kata atau kalimat.¹³

Dalam hal ini peneliti menggunakan deskriptif yang bersifat eksploratif, yaitu *dengan* menggambarkan keadaan atau status fenomena.

¹³ *Ibid*, hlm.30

Peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan komite MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Dengan berusaha memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam rumusan masalah dan menganalisa data-data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

Proses analisis data dilakukan peneliti adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, dimulai dari berbagai sumber yaitu dari beberapa informan dan pengamatan langsung di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, transkrip wawancara dan dokumentasi. Setelah dibaca dan dipelajari serta ditelaah maka langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi yang akan membuat rangkuman inti. Tahap 2) Proses pemilihan, yang selanjutnya menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian di integrasikan pada langkah berikutnya, dengan membuat koding. Koding merupakan symbol dan singkatan yang diterapkan pada sekelompok kata-kata yang bisa berupa kalimat atau paragraf dari catatan di lapangan.¹⁴ Tahap terakhir 3) Pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah pada tahap pembahasan hasil penelitian.

G. Pengecekan keabsahan data

Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, yaitu pendahuluan, penyaringan dan melengkapi data yang masih kurang. Dari ketiga tahap tersebut, untuk pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data.

¹⁴ Miles, *dkk*, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan: Tjejep RR (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.87

Oleh sebab itu jika terdapat data yang tidak relevan dan kurang memadai maka akan diadakan penelitian atau penyaringan data sekali lagi di lapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas tinggi. Dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data.¹⁵ Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik Perpanjangan Keikutsertaan, ialah keberadaan peneliti di lapangan dalam waktu yang cukup lama untuk memastikan validitas data yang diperoleh. Sehingga dapat mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data. Selain itu juga dapat menjalin kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan kepercayaan peneliti sendiri.¹⁶
2. Ketekunan Pengamatan, hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan kegiatan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol, sehingga dapat menghindari kesalah pahaman.
3. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam proses pengumpulan data, dengan

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.195

¹⁶Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.172

triangulasi peneliti dapat *me-rechek* temuannya dengan jalan membandingkan berbagai sumber, metode atau teori.¹⁷

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Ada enam tahap yang harus dilakukan oleh peneliti, dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Enam tahapan tersebut, antara lain adalah menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu:

- a. Mengetahui latar penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lapangan
- c. Berperan serta sambil mengumpulkan data

3. Tahap Analisis Data

Analisis data menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah atau menganalisis data. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik analisis kualitatif deskriptif naratif logis.

Inti analisis terletak pada tiga proses yang berkaitan, yaitu: mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya dan melihat konsep-

¹⁷ *Ibid*, hlm.330

konsep yang muncul itu satu dengan yang lainnya berkaitan. Proses itu merupakan proses siklikal untuk menunjukkan bahwa ketiganya berkaitan satu dengan yang lainnya, analisis kualitatif merupakan proses interatif.¹⁸

Oleh karena itu, setelah memperoleh data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, maka peneliti akan menggambarkan dengan jelas fenomena yang ada di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, peran dan fungsi Komite Madrasah serta MBM, dengan cara memadukan hasil observasi dari peneliti, hasil wawancara dengan berbagai macam komponen dan dokumen terkait yang didapat.

¹⁸ Ibid

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Nama Madrasah	:Madrasah Tsanawiyah Maarif
Status	:Terakreditasi “A”
Alamat Madrasah	:Jl. Kamajaya Teks No.96 Sukorejo Pasuruan 67161
Nomor Telepon	:(0343) 612453
Email	: mtsmaarifusukorejo@ymail.com
Kecamatan	: Sukorejo
Kabupaten	: Pasuruan
Propinsi	: Jawa Timur
Tahun Berdiri	: 1970

2. Sejarah Singkat MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

Madrasah Tsanawiyah Maarif Sukorejo Pasuruan yang didirikan oleh para kyai dan para tokoh Masyarakat Sukorejo pada awal berdirinya bernama MADRASAH DINIYAH MU'ALLIMIN yang didirikan pada tahun 1966. Dikarenakan perkembangannya kurang menggembirakan, sehingga pada **tahun 1970** Madrasah Diniyah ini dirubah menjadi **MADRASAH TSANAWIYAH MAARIF**. Perubahan nama tersebut berdasarkan inisiatif dari Ustadz Hanafi Mukri (beliau termasuk salah satu pendiri MTs Maarif Sukorejo). Adapun orang-orang yang membantu perubahan sekaligus operasionalisasi Madrasah tersebut antara lain :

1. KH. Muslikh Abdesshomad (alm)
2. Ust. Ali Makki Hs (alm)
3. Ust. Faqih Mas'ud
4. Ust. Ngarip Harahap (alm)
5. Ust. H.M. Maksoem Ts (alm)

Sebagai Kepala Madrasah pertama kali yakni USTADZ HANAFI MUKRI (pada tahun 1970). Selanjutnya pada tahun 1974 posisi Kepala Madrasah digantikan oleh Kyai muda saat itu yakni: KH. MUDJTABA ABDESSHOMAD. Beliau menjabat Kepala Madrasah selama 37 tahun. Pada tahun 2013 beliau ditunjuk oleh Pengurus Yayasan untuk menjadi Kepala Madrasah Aliyah yang masih berada di lingkungan YP. Maarif Sukorejo dan Jabatan Kepala MTs. Maarif Sukorejo digantikan oleh: Drs. H.M. TAUKHID, M.Pd.I yang juga ditunjuk oleh Pengurus Yayasan.

Madrasah Tsanawiyah Maarif Sukorejo telah diakreditasi berstatus DIAKUI pada tahun 1992, berstatus DISAMAKAN pada tahun 1999 dan sampai sekarang berstatus akreditasi "A" (Unggul). perkembangan pesat telah banyak dilalui oleh Madrasah ini, mulai dari kesiswaan, prestasi akademik dan lainnya.¹

3. Letak Geografis MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan berlokasi di desa Sukorejo Pasuruan Jawa Timur. Madrasah ini dibangun di areal tanah seluas 1365 M² dengan status tanah waqaf. Dari total tanah tersebut digunakan untuk

¹ (Dokumen Administrasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan)

bangunan seluas 882 M². Dimana tanah bangunan tersebut terdiri dari beberapa lembaga dari Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Menengah Atas (SMA). Madrasah Tsanawiyah Maarif Sukorejo Pasuruan berada di wilayah yang cukup strategis yakni Pusat Kota Kecamatan Sukorejo tepatnya 20 meter utara Jalan Propinsi KM 55 Surabaya - Malang. Untuk denah lokasi dapat dilihat di lampiran.

4. Visi, Misi dan Tujuan MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

a) Visi Madrasah

“MEWUJUDKAN INSAN UNGGUL DI BIDANG IPTEK dan IMTAQ”.

b) Misi Madrasah

Pemberdayaan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua dan masyarakat dalam melaksanakan program dilakukan dengan jalan:

- 1) Tertib dan disiplin WAKTU
- 2) Tertib dan disiplin ADMINISTRASI
- 3) Tertib dan disiplin TUGAS
- 4) Tertib dan disiplin ANGGARAN
- 5) Tertib dan disiplin KERJA

5. Tujuan MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

Pada tahun 2009-2014 MTs berusaha mencapai tujuan :

- a) Meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal sholeh pada seluruh warga madrasah

- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana atau prasarana serta pemerdayaannya, yang mendukung peningkatan prestasi amaliah keagamaan Islam, prestasi akademik dan non akademik
- c) Meningkatkan nilai rata-rata UN secara berkelanjutan
- d) Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler
- e) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menguasai Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin
- f) Meningkatkan kemampuan pendidik dalam bidang komputer dan internet
- g) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang computer
- h) Menambah kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana laboratorium IPA

6. Organisasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

Struktur organisasi merupakan suatu susunan kerja yang terencana dan sistematis dalam menjalankan roda organisasi madrasah. Sehingga setiap individu pengurus mendapatkan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun bagan struktur organisasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan sebagaimana terlampir.

7. Kondisi Sarana Prasarana MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

1) Jumlah dan Kondisi Ruangan

Untuk mengetahui sarana fisik, peneliti telah melakukan penggalan data dan observasi langsung di lokasi penelitian, serta

didukung dengan data dokumentasi yang penulis peroleh. Lebih jelas dapat dipaparkan sebagai berikut.²

MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan mempunyai 24 ruang kelas, pembagiannya adalah Masing-masing kelas VII, VIII dan IX mempunyai delapan ruang kelas yang digunakan proses kegiatan belajar mengajar. Gedung kelas VII terletak di lantai dua, untuk gedung Kelas VIII berada disebelah utara kantor guru dan di sebelah selatannya perpustakaan. Sedangkan gedung kelas IX berada di sebelah kantor SMA atau di sebelah utaranya musholla.

Sedangkan Satu ruang Kepala Madrasah dengan luas tanah 8 M² yang terletak di kantor MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dengan kondisi baik dan nyaman. Selain itu, disebelah utara ruang Kepala Madrasah terdapat satu ruang TU / Administrasi dengan luas tanah 20 M² dan dilengkapi dengan empat buah printer dan dua buah komputer, satu buah komputer digunakan untuk mengatur administrasi madrasah dan satu buah komputer lainnya digunakan oleh guru-guru untuk mengumpulkan dokumentasi perangkat pembelajaran dan nilai-nilai siswa. Dan di sebelah utara ruang TU / Administrasi terdapat ruang Guru dengan luas tanah 42 M² yang mana setiap guru difasilitasi satu meja dan kursi yang ada lacinya.

Sementara perpustakaan dengan luas tanah 42 M² terletak di timur ruang TU / Administrasi SMA Maarif karena ruangnya

² Sumber: Administrasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan 2013/2014, observasi tanggal 30 Januari 2014

dalam satu lokasi. Adapun ruang BK / BP dengan luas tanah 12 M² terletak di lantai dua sebelah ruang kelas VII, sedangkan lab. Komputer dengan luas tanah 42 M² berada di samping timur ruang perpustakaan. Kemudian lab. MIPA dengan luas tanah 42 M² berada di utara kelas VIII, sedangkan lab. Bahasa dengan luas tanah 42 M² berada di selatan ruang lab. MIPA.

Adapun Musholla dengan luas tanah 42 M² berada di selatan ruang kelas IX yang didalamnya di fasilitasi mukenah dan Al Quran. Di samping selatannya Musholla terdapat kantin dengan luas tanah 12 M². Sedangkan WC / Toilet siswa berjumlah delapan dengan luas tanah 30 M², dua WC / Toilet siswa dan dua WC / Toilet siswi berada di selatan kantin, sedangkan dua WC / Toilet siswa dan dua WC / Toilet siswi lainnya berada di lantai 2 sebelah pojok utara. Kemudian WC / Toilet Guru berjumlah dengan luas tanah 12 M², dengan pembagiannya satu WC / Toilet Guru laki-laki dan satu WC / Toilet Guru Perempuan letaknya berada di sebelah utara kantor MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan memiliki bank mini dan koperasi madrasah yang berfungsi sebagai alat menabung para siswa atau warga madrasah. Selain itu pada koperasi madrasah atau Toko isinya peralatan (Alat Tulis Kantor) ATK, kue, peralatan sehari-hari dan foto copy.

Dari deskripsi diatas mengenai jumlah dan kondisi sarana dan prasarana di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dalam keadaan baik. Untuk lebih lengkapnya tersaji dalam tabel sebagai lampiran.

2) Fasilitas Penunjang Pendidikan

MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan selain memiliki sarana prasarana yang baik, juga memiliki fasilitas penunjang dalam pendidikan. Adapun fasilitas penunjang pendidikan MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan sebagai berikut.³

Alat peraga olahraga berjumlah satu set, alat peraga IPA dan IPS berjumlah satu set, komputer berjumlah 5 buah, printer berjumlah 4 buah dan laptop berjumlah satu buah. Sehingga di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan masih kurang memadai dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada. Namun untuk peralatan penunjang praktek laboratorium sudah mencukupi, hal itu disiasati dengan sistem *rolling* (dijadwal secara bergantian) untuk pemakaiannya. Kondisi tersebut dikarenakan MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan masih dalam tahap pengembangan multimedia atau penggunaan ICT. Dengan demikian Komite Madrasah sangat berperan dalam usaha mencari bantuan dana guna melengkapi kebutuhan sarana prasarana tersebut. Untuk lebih lengkapnya tersaji dalam tabel sebagai lampiran.

³ Sumber: Administrasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan 2013/2014, observasi tanggal 7 Januari 2014

8. Kondisi Guru dan Pegawai MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

Tenaga kependidikan yang ada di madrasah dibagi menjadi dua komponen, yaitu tenaga edukatif dan tenaga administratif. Tenaga edukatif adalah guru yang bertugas mengajar, mendidik dan membimbing siswa di kelas. Sedangkan tenaga administratif adalah guru yang mengurus bidang administrasi yang berkaitan dengan kebutuhan siswa, pegawai dan perlengkapan madrasah. Meski demikian ada beberapa orang tenaga edukatif yang juga merangkap jabatan menjadi tenaga administratif karena mumpuni dalam bidangnya. Oleh karena itu, perlu tenaga professional untuk masing-masing komponen tersebut agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab. Berikut data Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga edukatif dan administratif MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan:

a) Data Guru dan Tenaga Administrasi menurut Tingkat Pendidikan.⁴

Dalam menjalankan Manajemen Berbasis Madrasah tidak terlepas dari peran seorang guru yang profesional, sehingga MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan memiliki Guru dilihat dari ketenagaan pendidikan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Guru Tetap Yayasan (GTY) sebanyak 31 orang, Guru Tidak Tetap (GTT) sebanyak 1 orang dan (DPK) istilah lain dari guru PNS yang diperbantukan di lembaga pendidikan swasta berjumlah 8 orang. Keseluruhan itu merupakan jumlah tenaga edukatif (guru) baik yang merangkap menjadi Tata

⁴ Sumber: Administrasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan 2013/2014, observasi tanggal 30 Januari 2014

Usaha (TU), Bimbingan Penyuluhan/Konseling (BP/BK) dan pengurus perpustakaan.

Riwayat pendidikan guru di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan lulusan S-1 berjumlah 24 guru, sedangkan lulusan S-2 berjumlah 8 dan menjabat sebagai PNS serta 5 guru lulusan SLTA.

Dalam pembagian tugasnya seorang pegawai mendapatkan tugas sesuai dengan kelayakan tugas atau dedikasinya. Mayoritas tenaga pendidik adalah alumni MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, sehingga keberadaan mereka pada umumnya lebih bersifat pengabdian kepada yayasan maarif sukorejo pasuruan dan tidak memperoleh gaji yang sesuai dengan standar regional. Inilah karakter yang menjadi kelebihan dan membedakan pelaksanaan pendidikan di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

Begitu juga dengan tingkat pendidikan SDM, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Eko Wihanto Ketua Komite Madrasah Maarif Sukorejo Pasuruan menunjukkan bahwa MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan masih terus mengadakan pengayaan pengetahuan bagi seluruh staf guru pengajarnya agar menjadi guru-guru yang professional, sehingga dapat memproses *input* dengan professional demi menghasilkan *output* yang berkualitas.

Salah satu dari program yang dirancang adalah mengadakan pelatihan bagi guru-guru, adanya beasiswa untuk guru ke jenjang S-2 dan mengupayakan beasiswa S1 untuk siswa lulusan. Sehingga

lulusan beasiswa tersebut terikat kontrak kerja dengan MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, dan mereka harus mengaplikasikan keilmuannya untuk mengajar di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.” Untuk lebih lengkapnya tersaji dalam tabel sebagai lampiran.

b) Data Siswa

Dalam manajemen kesiswaan terdapat empat prinsip dasar, yaitu: (a) siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka; (b) kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal; (c) siswa hanya termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang diajarkan; dan (d) pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif, dan psikomotor.

MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan memiliki perencanaan dalam penerimaan siswa, sebagai berikut. Setiap tahunnya siswa baru yang ingin melanjutkan pendidikannya di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan cukup banyak dengan penilaian masing-masing terhadap madrasah, namun setelah mendaftarkan diri mereka harus mengikuti tes seleksi masuk, materi yang diujikan meliputi mata pelajaran umum dan agama. Hal ini dilakukan untuk mengklasifikasikan kemampuan

mereka. Nilai tes yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan kompetensinya dan di gunakan untuk penempatan kelas.

Data siswa MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan tahun ajaran 2013-2014 kelas VII berjumlah 93 laki-laki dan 118 perempuan, kelas VIII berjumlah 94 laki-laki dan 95 perempuan, dan kelas IX 93 laki-laki dan 78 perempuan. Sehingga total seluruh siswa siswi kelas VII, VIII dan IX adalah 571 siswa. Untuk lebih lengkapnya tersaji dalam tabel sebagai lampiran.⁵

Berikut kegiatan ekstra kurikuler MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan tahun ajaran 2013/2014:

1. *Pramuka*
2. *OSIS*
3. *PMR / UKS*
4. *Seni Musik Kontemporer (Al Banjari)*
5. *Paduan Suara*
6. *Dalam bidang olahraga (Sepak Bola, Bola Voli, Bulu Tangkis)*
7. *English Club*
8. *Arabic Club*
9. *MIPA Club*
10. *Mandarin Club*

Selain itu ada kegiatan intra dan kegiatan wajib bagi siswa siswi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan yaitu setiap hari jumat ada

⁵ Sumber: Administrasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan 2013/2014, observasi tanggal 30 Januari 2014

“gerakan jumat amal” yang mana setiap siswa siswi berinfag seikhlasnya untuk disumbangkan kepada fakir miskin. Selain itu, di hari jumat setiap siswa siswi kelas IX istighosah berada di masjid jami’ letaknya dekat dengan MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Dan setiap hari ketika dhuhur diwajibkan sholat berjamaah di musholla.

Selain itu, program kerja Kepala Madrasah diantaranya dalam pembentukan karakter, siswa-siswi diberikan Buku Karakter Siswa (BKS) yang mana setiap hari siswa diwajibkan hafalan surat-surat pendek atau juz amma dan asmaul husna dan menggunakan sistem setoran atau sima’an kepada guru yang mengajar pada jam pertama.⁶

Semua program MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, hal tersebut sangat membantu perkembangan kecerdasan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil prestasinya di Madrasah. Tata tertib siswa madrasah adalah mengikuti seluruh kegiatan madrasah baik intra maupun ekstrakurikuler.

c) Prestasi Siswa MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

Prestasi siswa atau siswi adalah salah satu bukti keberhasilan dari suatu proses pembelajaran yang terjadi di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan juga ikut andil dan cukup masyhur dalam berbagai *event* perlombaan lokal, nasional dan internasional. Tidak hanya dalam kompetisi akademik, namun juga kegiatan ekstra lainnya. Hal itu

⁶ Wawancara pada tanggal 8 Februari 2014 pukul 09.00-11.00 wib, dengan Bpk. Drs. H.M. Tauhid, M.Pdi (Kepala Sekolah), sebagai Kepala Madrasah MTs Maarif Sukorejo Pasuruan

dapat dibuktikan dengan prestasi siswa/siswi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan sejak tahun 2006 hingga tahun 2014 sebagai berikut:⁷

- 1) Juara I Lomba Pidato Bahasa Inggris Dinas P & K- Tk Kabupaten tahun 2006
- 2) Juara II Lomba Pidato Bahasa Inggris se Jawa Timur tahun 2006
- 3) Juara IV Kaligrafi beasiswa Sampoerna tahun 2006
- 4) Juara II Bulu tangkis tunggal se Jawa Timur tahun 2006
- 5) Juara III Lomba MTQ Putra tahun 2007
- 6) Juara III Lomba Pidato Bahasa Arab PC. IPNU Kab. Pasuruan tahun 2007
- 7) Juara I Lomba Bola Voly tahun 2007
- 8) Juara II Lomba Mata pelajaran Matematika Dinas P & K- Tk. Kabupaten tahun 2007
- 9) Juara I Lomba Pidato Bahasa Arab Porseni kab. Pasuruan tahun 2007
- 10) Juara I Lomba Tenis Meja beregu SMP/ MTs. Tahun 2008
- 11) Juara III Lomba Pidato Bahasa Inggris beasiswa Sampoerna tahun 2008
- 12) Juara III Lomba Mata Pelajaran Bahasa Arab Dinas P & K-Kab. Pasuruan tahun 2008
- 13) Juara II Lomba Pidato Bahasa Inggris Hardiknas Kab. Pasuruan tahun 2009

⁷ Sumber: Administrasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan 2013/2014, observasi tanggal 8 Februari 2014

- 14) Beasiswa Sampoerna Foundation Di Malang tahun 2010
- 15) Beasiswa Sampoerna Foundation Di Palembang tahun 2010
- 16) Juara II Lomba Pidato Bahasa Arab se-Jawa Timur tahun 2010
- 17) Juara I Lomba Mata pelajaran Bahasa Indonesia MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan/Swasta Kab. Pasuruan tahun 2010
- 18) Juara II Lomba Bahasa Arab Kab. Pasuruan tahun 2011
- 19) Juara I Lomba Pidato Bahasa Arab se-Jawa Timur tahun 2013⁸
- 20) Juara I Lomba Mata pelajaran Matematika Kab. Pasuruan tahun 2013
- 21) Juara III Lomba Pidato Bahasa Inggris Kab. Pasuruan tahun 2013
- 22) Juara III Biologi Club Kab. Pasuruan tahun 2013
- 23) Juara II PAI kab. Pasuruan tahun 2014

9. Keberadaan Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengemukakan bahwa Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas madrasah serta tokoh masyarakat, dan berfungsi memberikan pertimbangan tentang manajemen madrasah. Secara khusus Komite Madrasah mempunyai pengertian sebagai lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan yang berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan

⁸ Wawancara pada tanggal 8 Februari 2014 pukul 11.00-12.00 wib, dengan Bpk. Fathur Rohim, S. Pd. M.Si, sebagai waka kesiswaan MTs Maarif Sukorejo Pasuruan

tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan madrasah. Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) menghendaki adanya keberadaan Komite Madrasah sebagai mitra madrasah dalam menjalankan program-program madrasah dan meningkatkan mutu pendidikan.

Demikian pula MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dalam menjalankan fungsi pendidikan melihat peran Komite Madrasah sebagai mitra atau *patner* kerjanya. Selain itu, Komite Madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan adalah sebagai lembaga musyawarah antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pendidikan untuk menentukan target hasil yang ingin dicapai. Lembaga ini bersifat mandiri, non-profit dan non-politis. Nama organisasi ini adalah “Komite Madrasah” sesuai dengan pasal 1 Bab I dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan yang telah ditetapkan sejak tahun 2003.

“Organisasi ini bernama Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dan beralamat di Jl. Kamajaya Teks No.96 Sukorejo Pasuruan 67161.”⁹

Kepengurusan Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan telah berlangsung selama sepuluh tahun, dan terjadi pergantian pengurus setiap lima tahun sekali sesuai dengan ketentuan ADART Komite Madrasah. Berikut penjelasan Ketua Komite Madrasah MTs.

⁹ Wawancara pada tanggal 8 Februari 2014 pukul 08.00-09.00 wib, dengan Bpk. M. Nukhin, S.Pd, sebagai waka kurikulum MTs Maarif Sukorejo Pasuruan

Maarif Sukorejo Pasuruan (Drs. Eko Wihanto) dalam hasil wawancara berikut:¹⁰

“Pengurus Komite Madrasah ini dibentuk sejak tahun 2003, setelah ditetapkannya Kepmendiknas Nomor 044/U/2002. Dan hampir dua periode bpk. Drs. Eko Wihanto di pilih menjadi Ketua Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Meskipun sebelum adanya Komite madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan sudah menjalankan kepengurusannya dalam mengembangkan madrasah melalui Yayasan Maarif Sukorejo. Pada dasarnya tugasnya sama, namun Komite Madrasah mempunyai cakupan tugas yang lebih spesifik terhadap lembaga MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Menurut bpk Drs. Eko Wihanto, adanya aturan dari Dewan Pendidikan mengenai kepengurusan Komite Madrasah di Swasta bisa merangkap atau diambil dari kepengurusan di Yayasan supaya tugas yang dilakukan Komite Madrasah tidak tumpang tindih dan berkesinambungan dengan tugas Yayasan. Sedangkan Jabatan Bpk. (Drs. Eko Wihanto) di Yayasan Maarif sebagai Sekretaris, akan tetapi di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan sebagai Komite Madrasah. Oleh karena itu kami merasa perlu untuk membuat AD/ART Komite Madrasah, agar tujuan, peran dan fungsinya Adapun struktur kepengurusan Komite Madrasah tahun ajaran 2013/2014 sebagaimana terlampir.¹¹

Oleh karena itu, dengan didirikannya komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan sangat membantu dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, dan pertimbangan dalam manajemen berbasis madrasah. Karena dalam mengembangkan madrasah tidak hanya peran kepala madrasah beserta jajarannya, akan tetapi semua warga madrasah yaitu, Guru, siswa, dan orang tua (masyarakat). Untuk menghasilkan input dan output yang baik.

Selain itu, keberadaan Komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa, tujuan,

¹⁰Wawancara pada tanggal 9 Februari 2014 pukul 10.00-12.00 wib, dengan Bpk. Drs. Eko Wihanto, sebagai ketua komite madrasah MTs Maarif Sukorejo Pasuruan

¹¹ Wawancara pada tanggal 15 Februari 2014 pukul 16.00-18.00 wib, dengan Bpk. Drs. Eko Wihanto, sebagai ketua komite madrasah MTs Maarif Sukorejo Pasuruan

mekanisme kerja dan rapat-rapat, peran, fungsi, program kerja, dan struktur organisasi yang lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut:

10. Tujuan Komite madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.¹²

11. Mekanisme kerja dan rapat-rapat komite MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

- 1) Musyawarah adalah forum yang terdiri dari pengurus dan perwakilan orangtua, komunitas sekolah dan tokoh masyarakat yang akan memilih pengurus baru (dilaksanakan 1 tahun sekali, kecuali ada hal-hal diluar ketentuan)
- 2) Rapat Kerja adalah pertemuan pengurus yang membahas:
 - a. Rencana Kegiatan Anggaran madrasah (RKAM)
 - b. Program kerja madrasah (PKM)
 - c. Rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM)
 - d. Hal-hal lainnya yang dianggap perlu dan penting.¹³

¹² Dokumentasi AD/ART Komite MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

12. Peran inti Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah (*eksekutive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.¹⁴

13. Fungsi Komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 3) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

¹³ Wawancara pada tanggal 24 Januari 2014 pukul 08.00-10.00 wib, dengan Bpk. M. Nukhin, S.Pd, sebagai waka kurikulum MTs Maarif Sukorejo Pasuruan

¹⁴ Dokumentasi pedoman umum dewan pendidikan dan komite sekolah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

- a. Kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBM);
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. Kriteria tenaga kependidikan;
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- 4) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 5) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

14. Program Kerja Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

Program kerja Komite Madrasah untuk membantu madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), ada beberapa program yang sangat penting diantaranya adalah:¹⁵

1) Program Umum

- a. Mengadakan rapat pengurus komite minimal 1 (satu) bulan se-kali.
- b. Bekerjasama dengan pihak-pihak luar untuk meningkatkan mutu madrasah.
- c. Sinkronisasi konsep pendidikan kepada orang tua siswa.

2) Program Khusus

¹⁵ Dokumentasi AD/ART Komite MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

a. Bidang Pendidikan

- 1) Membantu pelaksanaan pelatihan-pelatihan pengembangan guru.
- 2) Membantu pelaksanaan pelatihan-pelatihan pengembangan siswa.

b. Bidang Sarana dan Prasarana

- 1) Renovasi gedung lantai 2.
- 2) Perbaikan gudang belakang perpustakaan.
- 3) Renovasi gedung lantai 3 dengan memberi sekat, pintu, jendela.
- 4) Pengadaan bangku /meja belajar siswa.
- 5) Membuat saluran air.
- 6) Penambahan ruang kelas.
- 7) Renovasi WC Siswa
- 8) Sertifikasi tanah

c. Bidang Sosial

- 1) Membantu pembiayaan siswa yang tidak mampu.
- 2) Mengupayakan kesejahteraan bagi guru dan pegawai madrasah.
- 3) Memberikan pelayanan mengenai pencapaian mutu pendidikan bagi orang tua siswa dengan memberi masukan- masukan yang membangun.

Dalam beberapa program kerja di atas, erat kaitannya untuk memajukan MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Dari segi sarana prasarana, dan dari segi manajemen madrasah.

“Saran dan harapan Pengurus Komite Madrasah bagi Madrasah adalah dalam mendukung MBM meliputi masalah Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus diperhatikan, seperti mengintensifkan guru dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi guru guna untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kualitas pendidikan. Selama ini Madrasah masih fokus mementingkan pembangunan fisik madrasah, dikarenakan sarana dan prasarana masih terbilang kurang memenuhi karena keterbatasan lahan atau lokasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebutuhan madrasah baik sarana prasarana maupun dalam meningkatkan proses KBM, usaha madrasah terbilang baik atas kerjasama dan dukungan semua warga MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dan orang tua siswa, sehingga komunikasi mengenai pengembangan madrasah berjalan dengan baik.¹⁶

Hasil wawancara di atas kiranya menjadi bahan evaluasi bagi Komite Madrasah dan MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan sebagai upaya dalam mendukung MBM untuk peningkatan mutu pendidikan baik segi SDM, karena SDM erat kaitannya dengan kualitas proses pendidikan di Madrasah.

15. Struktur pengurus komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

Struktur organisasi komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan pada dasarnya sudah sesuai dengan konsep pengurus dalam sebuah Komite Sekolah, yaitu terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakilnya, dan beberapa kepala bidang serta anggotanya yang meliputi bidang humas, sarana prasarana,

¹⁶ Wawancara pada tanggal 15 Februari 2014 pukul 16.00-18.00 wib, dengan Bpk. Drs. Eko Wihanto, sebagai ketua komite madrasah MTs Maarif Sukorejo Pasuruan

ketenagaan, keuangan. Mengenai pembagian nama-nama dalam struktur pengurus Komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan yang lebih jelas dapat dilihat dalam lampiran.

B. Paparan Data Penelitian

1. Peran Komite Madrasah dalam Mendukung MBM MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

Empat peran Komite Madrasah yang ditetapkan dalam ADART Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, yaitu:

- 1) Sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Madrasah.

Pengembangan yang telah dilakukan oleh Komite Madrasah dalam rangka memberi pertimbangan adalah menyangkut masalah sarana dan prasarana, program yang dilakukan pada tahun ajaran 2013/2014 berdasarkan kesepakatan antara pihak Madrasah dengan orang tua atau wali siswa adalah sebagai berikut :

- a) Pengadaan atau penambahan ruang kelas
- b) Pembuatan absen (*Finger Print*) bagi siswa
- c) Sholat berjama'ah dhuhur di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

Komite Madrasah disini juga berperan untuk pengembangan MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ini, misal saja untuk pembangunan

dan melengkapi sarana dan prasarana perlu partisipasi semua pihak, komite dan masyarakat harus bekerja keras untuk mewujudkannya.¹⁷

Komite Madrasah selalu memotivasi orang tua/wali siswa dan masyarakat sekitar agar lebih aktif dalam memberikan masukan, baik yang berupa kritik, saran, ide, tuntutan dan yang semacamnya demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan¹⁸. Komite Madrasah juga mendorong orang tua/wali siswa dan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dengan menggalang dana masyarakat dan turut serta melakukan evaluasi.

- 2) Komite Madrasah sebagai pendukung (*supporting agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Madrasah.

Untuk mendukung manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan dari segi sarana prasarana, diadakan rapat pengurus. Dari hasil wawancara dengan ketua Komite Madrasah Drs. Eko Wihanto:

“Peran Komite Madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dalam mengembangkan madrasah khususnya masalah sarana dan prasarana pendidikan di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan harus berusaha untuk memperoleh dana yang berasal dari SPP, infaq, sumbangan sukarela orang tua siswa atau sumbangan lain yang tidak mengikat dari instansi-instansi atau dari para donatur yang peduli pendidikan. Sedangkan dana untuk penyelenggaraan pendidikan berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional Madrasah).

¹⁷ Wawancara pada tanggal 18 Februari 2014 pukul 16.00-18.00 wib, dengan Bpk. Drs. Eko Wihanto, sebagai ketua komite madrasah MTs Maarif Sukorejo Pasuruan

¹⁸ Ibid

Selain itu, dalam melaksanakan proses pembelajaran, Komite Madrasah memberi dukungan dengan cara mengadakan pelatihan bagi para guru MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, bertujuan agar guru memiliki wawasan luas dalam mengaplikasikan pada pembelajaran di kelas. Sedangkan bagi siswa, adanya kelas Dinamis yang merupakan kelas yang terdiri dari siswa siswi yang berbakat pada bidang akademik untuk diasah lebih dalam wawasannya.

Dukungan pemikiran yang diberikan oleh Komite Madrasah kepada Madrasah diwujudkan dengan memberi pertimbangan dalam menentukan besarnya SPP, merancang RAPBM, merencanakan program kerja dan memecahkan masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Bahan pertimbangan yang diberikan Komite Madrasah berasal dari aspirasi, ide, dan tuntutan masyarakat yang telah ditampung dan diolah sedemikian rupa oleh Komite Madrasah.¹⁹

- 3) Peran Komite Madrasah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di Madrasah.

Dalam melakukan kontrol terhadap Madrasah, Komite Madrasah mengadakan rapat koordinasi secara intensif agar dapat mengontrol dan mengarahkan program-program yang telah

¹⁹ Ibid

direncanakan Madrasah demi tercapainya tujuan bersama antara masyarakat dan pihak Madrasah. Pertemuan ini bertujuan untuk menetapkan dan mengevaluasi program kerja Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

- 4) Peran Komite Madrasah sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di Madrasah.

Untuk berkomunikasi dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat, komite madrasah bisa mengundang langsung dan berkomunikasi verbal secara langsung atau bisa komunikasi menggunakan handphone atau home visit. Namun, untuk berkomunikasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dilakukan sendiri oleh pihak Madrasah karena bagaimanapun juga diantara pengurus Komite Madrasah juga terdapat beberapa pengelola Madrasah. Sedangkan Komite Madrasah hanya menerima laporan hasil komunikasi antara pihak Madrasah dan pemerintah kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada masyarakat. Itulah bentuk aplikasi peran Komite Madrasah sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Keberadaan komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan yang memiliki peran dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah khususnya dalam proses belajar mengajar, dapat dilihat dari pernyataan beberapa informan yang menduduki jabatan penting pada Komite madrasah, dan kepala madrasah beserta beberapa

waktunya, yang di wawancarai oleh peneliti. Hasil wawancara sebagai berikut:

Bpk. Drs. Eko Wihanto menyatakan bahwa: Peran komite dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) pada Proses Belajar Mengajar (PBM) jelas sangat penting, seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam komite itu terdapat beberapa bidang yang memberikan monitoring dan mengecek selalu pelaksanaan dari program-program yang telah disusun, seperti monitoring seluruh kegiatan pembelajaran yang ada di madrasah dari segi penyelenggaraannya, fasilitas atau sarana dan prasarana yang diperlukan dalam PBM, serta peningkatan SDM guru melalui workshop PTK atau study banding agar guru lebih kreatif, inovatif dalam menerapkan metode pembelajaran, dan mengadakan evaluasi terhadap masalah apa yang dihadapi dalam pembelajaran.²⁰

Bpk. Drs. H.M. Tauhid, M.Pdi menyatakan bahwa: Didalam Proses Belajar Mengajar (PBM) peran komite itu sangat penting sekali, karena komite disamping ikut bersama-sama selalu mengawasi pelaksanaan dari program-program yang telah dilaksanakan. Diantaranya PBM, karena inti dari penyelenggaraan pendidikan itu adalah keberhasilan dan kualitas output yang dikeluarkan tergantung pada waktu PBM agar siswa benar-benar menjadi siswa yang sesuai dengan tujuan, visi dan misi madrasah. Oleh karena itu apabila dalam penyelenggaraan PBM ada kesulitan atau masalah dan pihak dewan guru tidak sanggup memberikan penyelesaian, maka semua masalah itu akan dibawa dalam rapat komite yang mana didalam musyawarah komite tidak hanya terdapat unsur guru saja, tetapi juga terdapat stakeholders lainnya, agar solusi dari problem itu dapat diambil dan bermanfaat dalam peningkatan PBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.²¹

Dari hasil wawancara diatas, mengenai peran Komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dalam menunjang proses belajar mengajar, dapat didiskripsikan bahwa Komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan sangat berperan penting dalam pelaksanaan PBM, hal ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa

²⁰ Wawancara pada tanggal 18 Februari 2014 pukul 16.00-18.00 wib, dengan Bpk. Drs. Eko Wihanto, sebagai ketua komite madrasah MTs Maarif Sukorejo Pasuruan

²¹ Wawancara pada tanggal 8 Februari 2014 pukul 09.00-11.00 wib, dengan Bpk. Drs. H.M. Tauhid, M.Pdi, sebagai ketua komite madrasah MTs Maarif Sukorejo Pasuruan

informan mengatakan bahwa dalam PBM komite berperan penting dalam memonitoring atau mengawasi pelaksanaan PBM, dan di dalam komite itu sendiri sudah dibentuk bidang bagian pembelajaran. Disamping itu peran komite dalam peningkatan kualitas PBM dapat dilihat dari upaya komite mengadakan workshop yang diperuntukkan menambah wawasan pengetahuan guru mengenai PTK, dimana semua pendanaan workshop itu digalang oleh komite.

Dalam mengaplikasikan Manajemen Berbasis Madrasah terdapat komponen yang didesentralisasikan adalah manajemen kurikulum, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, serta manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat. Adapun yang dimaksud tersebut dapat dilihat pada skema dibawah ini.

Disamping itu komite selalu memperhatikan kesejahteraan dan sikap kerjasama, baik terhadap guru maupun siswa di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, karena hal itu menurut komite sangat menunjang dalam aktualisasi dan pelaksanaan proses belajar mengajar.

2. Upaya Komite Madrasah dalam mengevaluasi MBM MTs. Maarif

Sukorejo Pasuruan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, madrasah perlu mengadakan evaluasi pelaksanaan program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi jangka pendek dilakukan setiap akhir semester atau awal semester untuk mengetahui keberhasilan

program secara bertahap. Bilamana pada satu semester dinilai adanya faktor-faktor yang tidak mendukung, maka madrasah harus dapat memperbaiki pelaksanaan program peningkatan mutu pada semester berikutnya.

Bpk. Drs. Eko Wihanto menyatakan bahwa: “Setiap awal semester, MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan mengadakan rapat dengan mengundang Komite Madrasah, Kepala Madrasah, Yayasan dan warga madrasah membahas mengenai program kerja tercapai atau tidak, dan pelaporan keuangan dan mengevaluasi oleh komite madrasah dan Komite Madrasah memberikan usulan untuk penambahan bangunan”.²²

Evaluasi jangka menengah dilakukan pada setiap awal tahun, untuk mengetahui seberapa jauh program peningkatan mutu telah mencapai sasaran-sasaran mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan evaluasi ini akan diketahui kekuatan dan kelemahan program untuk diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya.

Bpk. Drs. Eko Wihanto menyatakan bahwa: “Selain itu, MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan juga mengadakan rapat awal tahun mengenai evaluasi mengenai keuangan madrasah dan dalam mengawal kegiatan belajar mengajar apakah mencapai sasaran. Jika belum, harus diadakan pembenahan untuk satu tahun kedepan”. Hasil evaluasi dari peran komite madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah dibuat laporan yang terdiri dari laporan teknis dan keuangan. Laporan teknis menyangkut program pelaksanaan dan program kerja komite madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah dan hasil dari pelaksanaan program kerja komite madrasah, sedang laporan keuangan meliputi penggunaan uang serta pertanggungjawabannya.²³

Sehingga semua yang berkaitan dengan pembangunan madrasah dan peningkatan mutu pendidikan harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan harus dikirim kepada

²² Wawancara pada tanggal 18 Februari 2014 pukul 16.00-18.00 wib, dengan Bpk. Drs. Eko Wihanto, sebagai ketua komite madrasah MTs Maarif Sukorejo Pasuruan

²³ Ibid

Pengawas atau ke Yayasan Maarif, Dinas Pendidikan Kabupaten, Komite Madrasah, Orang Tua Siswa.

Pada aktualisasi komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan masih terdapat sedikit hambatan baik dari segi program yang telah dibuat maupun SDM yang menjalankannya. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih jelas kesulitan atau problem yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program dari Komite madrasah peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa informan yang mempunyai peran penting di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan menurut beberapa pernyataan informan sebagai berikut:

Bapak Drs. Eko Wihanto menyatakan bahwa: mengenai hambatan yang dirasakan komite diantaranya, kurang maksimalnya kehadiran pengurus dan anggota komite untuk dapat selalu berperan aktif dalam pengawasan dan memonitoring pelaksanaan pendidikan di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Hal ini dikarenakan dari pengurus dan anggota komite sebagian besar unsur luar dan mempunyai kesibukan sendiri. Seperti saya ini juga mempunyai banyak kesibukan dan urusan diluar jadi tidak dapat selalu berada di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.²⁴

Bapak Drs. H.M. Tauhid, M.Pdi menjelaskan bahwa: kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang telah disusun bersama komite adalah kurang maksimalnya kontribusi pengurus dan anggota komite untuk hadir mengawasi program tersebut. Sedangkan dalam proses belajar mengajar yang menjadi kendala adalah SDM guru yang tidak sama kemampuannya dalam mengaplikasikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media dan fasilitas yang ada. Jadi dari SDM yang tidak sama itupun bisa berpengaruh terhadap penyelenggaraan mutu pendidikan di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.²⁵

Bapak M. Nukhin, S.Pd menyatakan bahwa: pada dasarnya pelaksanaan dari program yang telah disusun bersama komite sudah berjalan cukup baik. Mengenai hambatan yang dihadapi adalah ketidaksamaan kemampuan para pegawai dan guru dalam menguasai IPTEK dan IT yang inovatif dan kreatif menunjang dalam pembelajaran,

²⁴ Wawancara pada tanggal 18 Februari 2014 pukul 16.00-18.00 wib, dengan Bpk. Drs. Eko Wihanto, sebagai ketua komite madrasah MTs Maarif Sukorejo Pasuruan

²⁵ Wawancara pada tanggal 8 Februari 2014 pukul 09.00-11.00 wib, dengan Bpk. Drs. H.M. Tauhid, M.Pdi, sebagai ketua komite madrasah MTs Maarif Sukorejo Pasuruan

jadi ada yang masih menggunakan metode lama dan tidak dapat memanfaatkan media yang ada. Atau bisa dikatakan SDM yang tidak sama antara guru yang tua dengan yang masih muda dalam menguasai hal itu. Disamping itu bagi anggota dan pengurus komite yang menjadi hambatan adalah tidak maksimalnya kontribusi yang diberikan dalam hal keahliannya di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan untuk selalu berada dikantor komite.²⁶

Dari hasil wawancara mengenai hambatan atau kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program Komite madrasah dalam perannya mendukung Manajemen Berbasis Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dapat dideskripsikan bahwa, faktor menonjol adalah tidak dapat melaksanakan secara maksimal perannya sebagai *controlling agency*, hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan informan mengenai kurang maksimalnya kontribusi anggota dan pengurus komite dalam memberikan waktunya hadir tiap hari dikantor komite. Hal ini yang menjadikan pengawasan dan monitoring dari pelaksanaan program tidak maksimal dan mempengaruhi mutu pendidikan di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Alasan yang menjadikan pengurus dan anggota komite tidak selalu hadir tiap hari dikantor komite karena rata-rata yang menjadi pengurus dan anggota komite adalah orang sibuk khususnya dari unsur luar, sebab profesi mereka merangkap menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi orang bisnis, sehingga sibuk dan sulit hadir tiap hari di kantor komite.

Dalam mengatasi berbagai hambatan peran komite madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah, banyak upaya yang telah

²⁶ Wawancara pada tanggal 8 Februari 2014 pukul 09.00-11.00 wib, dengan Bpk. M. Nukhin, S.Pd, sebagai waka kurikulum MTs Maarif Sukorejo Pasuruan

dilakukan oleh pihak komite madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Diantaranya adalah dengan selalu menjalin hubungan komunikasi antara pengurus dan anggota komite dalam memantau perkembangan dan kegiatan program di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Disamping itu Komite madrasah untuk lebih rutin hadir di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan agar dapat mengontrol dan memonitoring pelaksanaan program, serta menampung aspirasi dari *stakeholder* madrasah apabila terdapat masalah atau usulan.

C. Temuan Penelitian

Paparan data telah cukup jelas mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh, sehingga dapat dikemukakan mengenai temuan-temuan penelitian:

Pertama, peran Komite Madrasah dalam mendukung MBM adalah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pendidikan, serta mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

Peran Komite madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) pada PBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan adalah membantu memecahkan masalah dalam menghadapi kesulitan belajar mengajar, mengevaluasi pelaksanaan program pada bidang pembelajaran,

memfasilitasi pelaksanaan proses belajar mengajar. Serta meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pihak komite dan madrasah telah dari upaya komite mengadakan workshop yang diperuntukkan menambah wawasan pengetahuan guru mengenai PTK dimana semua pendanaan workshop itu digalang oleh komite madrasah.

Namun, Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan belum maksimal dalam melaksanakan satu perannya sebagai *controlling*, disebabkan kesibukan masing-masing pengurus Komite sehingga sulit untuk melaksanakan rapat/musyawarah antar Pengurus Komite dan Pengurus Madrasah untuk mengevaluasi masalah keuangan. Oleh karena itu, harus ada pembenahan kinerja antara Komite Madrasah dan Pengurus Madrasah dengan menjalin kembali komunikasi yang baik agar tercipta suasana yang transparan, akuntabel dan demokratis.

Kedua, upaya yang dilakukan oleh Komite Madrasah dalam mengevaluasi MBM diantaranya adalah mengadakan evaluasi pelaksanaan program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi jangka pendek dilakukan setiap akhir semester atau awal semester untuk mengetahui keberhasilan program secara bertahap. Evaluasi jangka menengah dilakukan pada setiap awal tahun, untuk mengetahui seberapa jauh program peningkatan mutu telah mencapai sasaran-sasaran mutu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Komite madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dalam mengevaluasi dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM).

Diantaranya dengan mengadakan: (1) Rapat evaluasi pengurus Komite madrasah setiap akhir semester, (2) Mengikuti rapat evaluasi bersama pengurus madrasah, (3) Mengadakan pertemuan wali siswa setiap dua tahun satu kali, (4) Menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah (Depag), tokoh masyarakat dan akademisi pendidikan, (5) Membantu madrasah dalam pencarian dana untuk pembangunan dan perlengkapan sarana prasarana.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Komite Madrasah dalam Mendukung Manajemen Berbasis Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai peran komite madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Bahwa keberadaan Komite madrasah berusaha menumbuhkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan bermutu dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat, kemudian menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan maupun masukan yang berasal dari masyarakat untuk dipergunakan sebagai bahan dalam memberi pertimbangan kepada Madrasah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah ini telah mengacu kepada undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan Pendidikan dan Komite Madrasah. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang bersifat universal, untuk seluruh umat dimanapun dan kapanpun. Di Indonesia pendidikan merupakan kebutuhan seluruh

warga negara, maka pengembangannya harus konseptual, menyeluruh, fleksibel dan berkesinambungan.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya adalah:²

1) Hak dan kewajiban Masyarakat

Pada pasal 8 dan 9 UUSPN disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan pasal 9 menyebutkan bahwa masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

2) Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah

Pasal 10 UUSPN menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah: a) wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, b) wajib menjamin tersedianya daya guna dan terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

¹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 89

² Ibid

3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan diatur dalam pasal 54 UUSPN, yaitu:

- a) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- b) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Bentuk peranserta masyarakat tersebut dapat dihimpun secara terorganisasi di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dalam suatu wadah yang disebut Komite madrasah, yaitu suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dan *stakeholders* dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan madrasah.

Hal ini sesuai dengan konsep Manajemen Berbasis Madrasah yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan konsep tersebut adalah bagaimana agar madrasah dan semua yang berkompeten atau stakeholder pendidikan dapat memberikan layanan dan berpartisipasi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak madrasah, keluarga, dan masyarakat atau *stakeholder* lainnya secara sistematis sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite madrasah.

Munculnya konsep tentang Manajemen Berbasis Madrasah, selanjutnya diikuti konsep baru yang disebut dengan Komite Madrasah terbentuk atas dasar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 diharapkan memiliki peran yang lebih luas, yaitu tidak saja sebatas instrumen madrasah dalam pengumpulan dana dari wali siswa, melainkan terlibat dalam pemberian pertimbangan, pendukung, pengontrol, sebagai mediator dan peran-peran strategis lainnya dalam pengembangan madrasah.³ Melalui konsep ini akan dilahirkan sebuah keadaan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dikelola secara terbuka dan demokratis. Belajar dari berbagai pengalaman dan juga kenyataan-kenyataan di lapangan, ternyata mengimplementasikan konsep Komite Madrasah tidak mudah.⁴

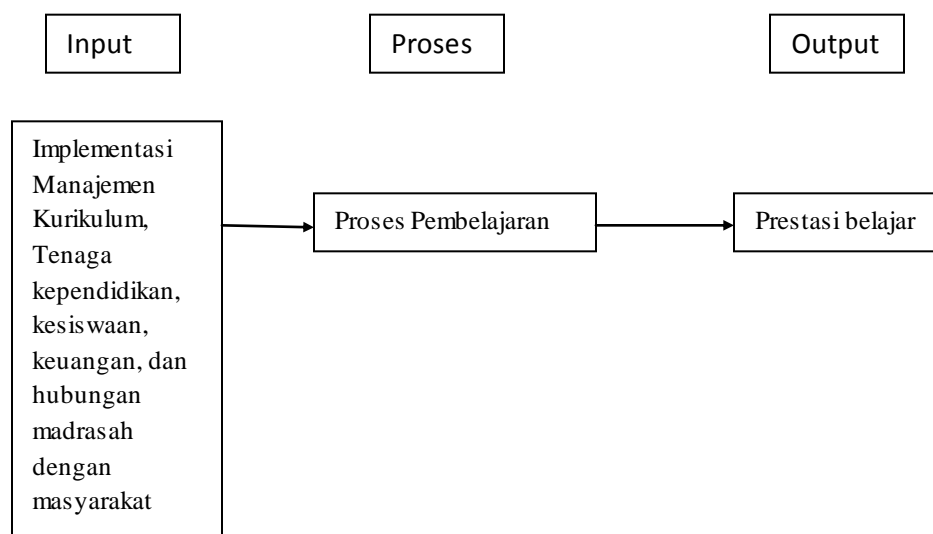
Selama ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana organisasi Komite Madrasah dapat berhasil melakukan fungsi dan peran sebagaimana yang diharapkan. Sehingga Komite Madrasah keberadaannya bukan sebatas sebagai pemenuhan syarat dan rukun sebuah lembaga pendidikan, melainkan ia benar-benar mampu memberi manfaat bagi pengembangan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan telah menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) sebagai landasan gerak untuk menjalankan perannya menjadi mitra Madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM).

³ Hadiyanto, *Mencari sosok desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia* (Jakarta:PT RINEKA CIPTA, 2004)Hlm.84-88

⁴ Mulyono, *Manajemen Administrasi*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA:2008), hlm. 234-235

Dalam mengaplikasikan Manajemen Berbasis Madrasah terdapat komponen yang didesentralisasikan adalah manajemen kurikulum, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, serta manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat. Adapun yang dimaksud tersebut dapat dilihat pada skema dibawah ini.



Tabel III. Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM).⁵

Dalam hal ini, bukan hanya instansi bersifat komersial saja yang dituntut untuk berkompetisi, akan tetapi lembaga pendidikan juga dituntut untuk bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain guna menawarkan jasa yang mempunyai kesesuaian dan keserasian dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus mempunyai sistem manajemen pendidikan yang baik dan mapan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

a) Implementasi Manajemen Kurikulum

⁵ Sri Minarti, *Manajemen Madrasah (Mengelola Lembaga Pendidikan secara mandiri)*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), hlm. 77

Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa kurikulum yang baik semestinya akan menghasilkan proses dan produk pendidikan yang baik. Sebaliknya, kurikulum yang buruk akan membuahkan proses dan hasil pendidikan yang tidak baik.

MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dalam mengimplementasi manajemen kurikulum menggunakan kurikulum KTSP dengan mengacu standar nasional. Sedangkan komite madrasah dalam mendukung implementasi manajemen kurikulum dengan mendukung memaksimalkan SDM dalam proses belajar mengajar serta mendukung adanya pelatihan-pelatihan bagi guru dan siswa.

b) Implementasi Manajemen Tenaga kependidikan

Manajemen tenaga kependidikan harus dilaksanakan oleh kepala madrasah, adalah menarik, mengembangkan, menggaji dan memotivasi tenaga kependidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara optimal, membantu tenaga kependidikan mencapai posisi dan standar perilaku, menyelaraskan tujuan individu, kelompok dan organisasi.

Pada MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, kepala madrasah yang berdominan dalam mengembangkan madrasah nya dengan dukungan komite madrasah berupa mengadakan rihlah dan pelatihan-pelatihan supaya warga madrasah semakin semangat dalam mencapai tujuan pendidikan.

c) Implementasi Manajemen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan bertujuan mengatur sebagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di madrasah dapat berjalan dengan lancar dalam mencapai tujuan pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, komite madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dalam mendukung bidang kesiswaan sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan siswa baru, kegiatan kemajuan belajar (pengelolaan proses pembelajaran), serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Komite madrasah dengan menjalin komunikasi kepada pihak madrasah dan masyarakat untuk mempromosikan MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

d) Implementasi Manajemen Keuangan

Dalam garis besarnya, pembiayaan MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan mencakup hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya personal dan biaya operasi. *Kedua*, biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana dan prasarana untuk pengembangan SDM, komite madrasah berperan sebagai pendukung dan pertimbangan dalam hal pemenuhan sarana prasarana madrasah dengan memberikan izin mengeluarkan biaya dengan ketentuan yang jelas. *Ketiga*, biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Komite madrasah mendukung pihak madrasah berperan sebagai pertimbangan dalam menentukan SPP untuk keberlangsungan proses belajar. *Keempat*, biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga

kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Komite madrasah membantu kepala madrasah dalam memberdayakan SDM dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan rihlah agar para guru semangat dalam mencapai tujuan pendidikan. *Kelima*, standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

e) Implementasi Manajemen Hubungan madrasah dengan masyarakat

Pendidikan merupakan wilayah kerja madrasah menjadi tanggung jawab bersama tiga elemen, yaitu orangtua, masyarakat, dan pemerintah.

Komite madrasah dalam menjalin hubungan dengan kepala madrasah dan masyarakat melalui pertemuan (rapat), hanphone atau home visit.

Hal itu dikuatkan secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 7 ,8 ,9 ,10 , dan 11 tentang hak dan kewajiban orangtua, masyarakat, dan pemerintah terhadap pendidikan.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai Manajemen Berbasis Madrasah bahwa ciri-ciri madrasah yang melaksanakan MBM, dilihat dari Kemampuan Madrasah, MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan memiliki kemampuan manajemen madrasah sedang dengan memberdayakan SDM (Kepala Madrasah, Guru, dan warga madrasah) untuk berkompetensi sehat dengan memberikan inovasi-inovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, partisipasi masyarakat sedang (termasuk

dukungan dana), pendapatan daerah, orangtua serta Anggaran madrasah di luar anggaran pemerintah sedang. Karena dilihat sekitar madrasah dan orang tua siswa pekerjaannya sebagian besar pedagang dan petani, sehingga pendapatannya tidak terlalu banyak.

Selain itu, berdasarkan temuan penelitian dari hasil wawancara dan observasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah dilakukan dengan menyusun rencana madrasah dan merumuskan kebijakan untuk madrasah sendiri dengan mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat yaitu menggunakan kurikulum KTSP. Dengan memberdayakan SDM nya yaitu warga madrasah. Serta komite madrasah dalam mengelola dana madrasah secara efektif dan efisien akuntabilitas keuangan dan administrasi.

Untuk dapat mengaplikasikan Manajemen Berbasis Madrasah dapat dilihat dari ciri-ciri Manajemen Berbasis Madrasah, adapun uraiannya sebagai berikut.

Ciri-ciri Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)⁶

Kemampuan Madrasah	Kepala Madrasah dan Guru	Partisipasi Masyarakat	Pendapatan Daerah dan Orangtua	Anggaran Madrasah
Madrasah dengan kemampuan manajemen tinggi	Kepala madrasah dan guru berkompotensi tinggi (termasuk kepemimpinan)	Partisipasi masyarakat tinggi (termasuk dukungan dana)	Pendapatan daerah dan orangtua tinggi	Anggaran madrasah di luar anggaran pemerintah besar.

⁶Sri Minarti, *Manajemen Madrasah Mengelola Lembaga Pendidikan secara mandiri* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), hlm.46-47

Madrasah dengan kemampuan manajemen sedang	Kepala Madrasah dan guru berkompotensi sedang (termasuk kepemimpinan)	Partisipasi masyarakat sedang (termasuk dukungan dana)	Pendapatan daerah dan orangtua sedang	Anggaran madrasah di luar anggaran pemerintah sedang.
Madrasah dengan kemampuan manajemen rendah	Kepala Madrasah dan guru berkompotensi rendah (termasuk kepemimpinan)	Partisipasi masyarakat kurang (termasuk dukungan dana)	Pendapatan daerah dan orangtua rendah	Anggaran madrasah di luar anggaran pemerintah kecil atau tidakada.

Kondisi diatas mengisyaratkan bahwa tingkat kemampuan manajemen madrasah untuk mengaplikasikan Manajemen Berbasis Madrasah berbeda antara satu sama lainnya. Hal tersebut sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam menyerap paradigma baru yang di tawarkan MBM. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban melakukan Peran-Peran maksimal untuk mempersiapkan pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah.

Selain itu, dapat dilihat mengenai ciri-ciri madrasah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah, sebagai berikut.

Ciri-ciri madrasah yang melaksanakan MBM

Organisasi Madrasah	Proses Belajar Mengajar	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya dan Administrasi
Menyediakan manajemen atau organisasi atau kepemimpinan transformasional dalam mencapai tujuan madrasah	Meningkatkan kualitas belajar siswa	Memberdayakan staf dan menempatkan personel yang dapat melayani keperluan Siswa	Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut. Sesuai dengan kebutuhan
Menyusun rencana Madrasah dan merumuskan kebijakan untuk Madrasah sendiri	Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat	Memiliki staf dengan wawasan MBM	Mengelola Dana Madrasah secara efektif dan efisien Akuntabilitas keuangan dan administrasi
Mengelola kegiatan operasional Madrasah	Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif	Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf	Menyediakan dukungan administratif
Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara Madrasah dan masyarakat	Menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa	Menjamin kesejahteraan staf dan siswa	Mengelola dan memelihara gedung dan sarana.
Menggerakkan partisipasi masyarakat	Berperanserta memotivasi siswa berperan serta dalam menetapkan kurikulum muatan local	Menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas kemajuan kinerja Madrasah	Partisipasi dalam penelusuran pembiayaan dan pengawasan penggunaan sumber daya.
Menjamin terpeliharanya Madrasah yang bertanggung jawab kepada	Mendorong kreatifitas dan inovasi dan bertanggung jawab		

masyarakat dan pemerintah			
---------------------------	--	--	--

Tipe Model Masdrasah yang menjalankan MBM

	Syarat 1	Syarat 2	Syarat 3	Syarat 4
Tipe Madrasah	Pemilihan Kepsek dan Guru	Bentuk partisipasi masyarakat	Lokasi/ kemampuan daerah dan orangtua	Kemampuan menghimpun dana
1. Penuh	Dipilih karena memiliki keterampilan	Partisipasi masyarakat besar dan dana	Pendapatan daerah tinggi	Dana tak bergantung pada pemerintah, tapi dari masyarakat
2. Menengah	Dipilih karena memiliki keterampilan	Partisipasi masyarakat besar dan dana	Pendapatan daerah sedang	Tergantung pada dana pemerintah
3. Minimal	Dipilih karena memiliki keterampilan	Partisipasi masyarakat kurang	Pendapatan daerah rendah	Sangat tergantung pada dana pemerintah

Karakteristik MBM bisa diketahui antara lain, bagaimana madrasah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi madrasah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan administrasi.⁷

Sehingga, dilihat dari ciri-ciri tersebut MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan termasuk Menyusun rencana Madrasah dan merumuskan kebijakan untuk Madrasahnyanya sendiri dan mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat dengan

⁷ Dadang Dally, *Balanced Score Card* "Suatu pendekatan dalam implementasi Manajemen Berbasis Madrasah" (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2010), hlm. 23

menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf dan berpartisipasi dalam penelusuran pembiayaan dan pengawasan penggunaan sumber daya serta mengelola Dana Madrasah secara efektif dan efisien Akuntabilitas keuangan dan administrasi

Selain melihat dari ciri-ciri Manajemen Berbasis Madrasah, Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan menjalankan empat peran-peran komite madrasah kemudian dijabarkan untuk kemudian diterapkan. Aktualisasi peran komite di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan cukup baik. Hal ini berdasarkan pada pengamatan peneliti terhadap kondisi dan realitas yang ada, begitu juga dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala madrasah, ketua komite waka kurikulum, kepada sebagian para guru. Secara mayoritas mereka menyampaikan bahwa keberadaan Komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan sangat membantu dan berperan penting sekali.

Sebagaimana tertulis dalam AD/ART Komite madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan Bab II pasal 3, maka peran Komite madrasah adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
- 2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan

⁸ Dokumentasi AD/ART Komite MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan
- 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dengan masyarakat.

Untuk mengaplikasikan dari peran komite madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan, komite madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan memiliki beberapa program untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan madrasah, maka fungsi Komite Madrasah yang ditetapkan ADART Komite Madrasah Bab II pasal 3 sebagai berikut:⁹

- a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di madrasah.
- b) Melakukan kerjasama dengan elemen masyarakat, baik dengan perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan.
- c) Menampung dan menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada madrasah mengenai: kebijakan dan program pendidikan; Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBM); kriteria kinerja madrasah; kriteria tenaga kependidikan; kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

⁹ Ibid

- e) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.
- g) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di madrasah.

Dari empat peran dan tujuh fungsi Komite madrasah diatas dapat dideskripsikan bahwa dalam aktulisasinya komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan. Dan dalam peranya mendukung Manajemen Berbasis Madrasah, komite berusaha memberikan pelayanan, menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat, suasana yang akuntabel dan demokratis, dan merealisasikan program-program komite kepada seluruh *stakeholders* MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komite madrasah itu di bentuk dalam rangka membantu menciptakan atau mewadahi partisipasi pada *stakeholder* agar turut serta dalam mendukung manajemen berbasis madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya, yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program madrasah secara proporsional, sehingga komite madrasah dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Oleh karena itu Islam mempunyai konsep musyawarah untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama. Sehingga setiap pihak dapat saling menerima, memahami dan mau menjalankan keputusan yang telah ditetapkan bersama. Allah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”. (Ali-Imran:159).¹⁰

Dalam ayat di atas, “syura” atau “musyawarah” sebagai sifat ketiga bagi masyarakat Islam dituturkan sesudah iman dan shalat. Menurut Taufiq asy-Syawi, hal ini memberi pengertian bahwa musyawarah salah satu ibadah yang tingkatannya sama dengan shalat dan zakat. Maka masyarakat yang mengabaikannya dianggap sebagai masyarakat yang tidak menepati salah satu ibadah.¹¹

Begitu juga dengan Komite Madrasah, keberadaannya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Menara Kudus 1993), hlm. 72.

¹¹ Abdul Qadir Haamid, Tijani, *Pemikiran Politik dalam Islam*; Terj., Abdul Hayyie al-Kattani dkk dari *Ushulul Fikris-Siyaasi fil-Qur'aanil-Makki* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2007), hlm. 103

Pembangunan Nasional (PROPERNAS). Selanjutnya demi memudahkan masyarakat dalam membentuk Komite Madrasah, Menteri Pendidikan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 dan diperkuat dengan aspek legal karena dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Keputusan dan undang-undang yang telah ditetapkan itu adalah hasil musyawarah yang mencapai mufakat.¹²

B. Upaya Komite Madrasah dalam mengevaluasi MBM MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai komite madrasah mengevaluasi program kerja dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan. Dari hasil temuan penelitian berdasarkan pada observasi dilapangan dan hasil wawancara, peneliti dapat menganalisis dan mendiskripsikan bahwa upaya yang dilakukan komite madrasah untuk mengevaluasi adalah dengan monitoring dan mengadakan evaluasi (rapat).

Adapun memonitoring dengan cara melakukan komunikasi dan kontak antara pengurus komite dengan anggotanya juga dengan pengurus madrasah baik melalui Handphone maupun saling berkunjung kerumah, hal itu dilakukan untuk selalu mendapatkan informasi dan melihat perkembangan aktivitas program di Madrasah. Langkah berikutnya adalah pihak komite selalu mengadakan rapat satu bulan sekali untuk evaluasi dan

¹² Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008), hlm. 260

membahas masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.¹³

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, peran komite madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) diantaranya adalah bersama-sama ikut dalam penyusunan program-program seperti RAPBM (rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah), PKM (program kerja madrasah), RPPM (rencana pengembangan program madrasah). Disamping itu banyak lagi peran komite yang meliputi monitoring pelaksanaan program, serta memfasilitasi untuk peningkatan SDM MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan diantaranya memberikan pelatihan TI, bahasa Inggris, workshop kewirausahaan dan beberapa seminar untuk peningkatan kualitas pembelajaran bagi guru dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

Pada komponen madrasah yang melaksanakan MBM dapat dilihat beberapa hal penting sebagai berikut:¹⁴

a) Komite Madrasah

Komite Madrasah adalah mitra penyelenggara madrasah khususnya Yayasan dan Pimpinan Madrasah dalam melaksanakan pelayanan dan proses pembelajaran serta melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan dengan warga masyarakat.

¹³ Hasil Wawancara dengan ketua komite madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

¹⁴ Direktorat Pendidikan Madrasah, Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta:2009), hlm. 31-34

- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Madrasah (RPJMM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Madrasah (RPTM).

Madrasah yang menerapkan MBM akan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Madrasah (RPJMM) yang memuat visi, misi, strategi dan tujuan jangka menengah pembangunan dan perkembangan madrasah termasuk rencana anggaran pendapatan belanja selama 5 tahun.

- c) Adanya sistem keterbukaan (transparansi) dan pertanggung jawaban (akuntabilitas).

Selain itu, keberadaan Komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan juga berperan sebagai evaluator program kerja dan peran yang telah dilaksanakan, dan membantu menyelesaikan masalah yang ada di madrasah, baik masalah yang dihadapi meliputi proses belajar mengajar, perlengkapan sarana prasarana, kesejahteraan guru dan pegawai, serta semua pendanaan yang berhubungan dengan peningkatan mutu Madrasah semua akan dicarikan solusi atau jalan keluar yang terbaik oleh komite. Selain itu komite berperan dalam mensosialisasikan program keseluruhan elemen dan *stakeholders* madrasah, juga menjembatani hubungan koordinatif antara pemerintah daerah, masyarakat, orang tua siswa dengan Madrasah.

Adapun tujuan dari penerapan Manajemen Berbasis Madrasah adalah.¹⁵

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatakan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, inisiatif madrasah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan yang tersedia.
- b. Meningkatkan kepedulian warga madrasah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
- c. Meningkatkan tanggung jawab madrasah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu madrasah.
- d. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Manajemen Berbasis Madrasah adalah peningkatan mutu pendidikan, yakni dengan mendirikan madrasah untuk mengelola lembaga bersama pihak-pihak terkait (guru, peserta didik, masyarakat, wali siswa, dan instansi lain) sehingga madrasah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu intruksi dari atas dalam mengambil langkah-langkah untuk memajukan pendidikan. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri.

¹⁵Hadiyanto, *Mencari sosok desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta:PT RINEKA CIPTA, 2004), hlm. 71

Sehingga dalam kerangka kerja komite madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah diharapkan bekerja sesuai tujuan Manajemen Berbasis Madrasah, antara lain sebagai berikut.¹⁶

1. Sumber Daya Madrasah harus memiliki fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan madrasah. Selain pembiayaan operasional/administrasi, pengelolaan keuangan, menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.
2. Pertanggungjawaban (*accountability*) madrasah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Pertanggungjawaban bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dengan menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Dengan cara mengkomunikasikan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk mengevaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.
3. *Kurikulum* berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, bahwa madrasah di dampingi komite madrasah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum dengan baik dari standar materi dan proses penyampaiannya.

Jelas bahwa, konsep manajemen berbasis madrasah berperan sebagai penentu kebijakan makro, prioritas pembangunan dan standar secara

¹⁶ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta, PT. RINEKA CIPTA, 2004), hlm. 211-212

keseluruhan melalui pembangunan fisik secara intensif informasi yang diperoleh melalui sistem monitoring dan evaluasi.

Selain itu, MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan di dukung komite madrasah mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi jangka pendek dilakukan setiap akhir semester atau awal semester untuk mengetahui keberhasilan program kerja secara bertahap. Evaluasi jangka menengah dilakukan pada setiap awal tahun, untuk mengetahui seberapa jauh program komite madrasah untuk peningkatan mutu pendidikan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan.

Keinginan untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan adalah cita-cita seluruh lembaga satuan pendidikan yang ada, baik lokal, nasional maupun internasional. Karena hal itu, juga akan turut mewujudkan sumber daya manusia yang unggul untuk memajukan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan program untuk mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), keberadaan Komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan dalam menjalankan perannya juga harus mengevaluasi dari program kerja dan perannya dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah yang dijelankannya.

Komite madrasah mendukung dalam mengevaluasi Manajemen Berbasis Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan sesuai program kerja sebagai berikut: (1) Rapat evaluasi pengurus Komite Madrasah setiap akhir

semester, (2) Mengikuti rapat evaluasi bersama pengurus Madrasah, (3) Mengadakan pertemuan wali siswa setiap satu tahun satu kali, (4) Menjalin kerjasama dengan pimpinan Yayasan Maarif Sukorejo, institusi pemerintah (Depag), tokoh masyarakat dan akademisi pendidikan, (5) Membantu Madrasah dalam pencarian dana untuk pembangunan dan perlengkapan sarana prasarana (6) Melaksanakan kontroling pada setiap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Madrasah.

Oleh karena itu, melakukan monitoring dan evaluasi penting untuk meyakinkan apakah program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, apakah tujuan telah tercapai dan sejauhmana pencapaiannya. Dan hasil evaluasi juga diperlukan untuk membenahi diri dari program yang telah dikerjakan untuk lebih maju.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian lapangan dan yang telah diuraikan pada pembahasan serta sesuai dengan rumusan masalah dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Komite madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan adalah sebagai badan mandiri yang menjadi mitra madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah dan menunjang proses belajar dan peningkatan mutu pendidikan, melalui empat peran inti dan tujuh fungsi Komite madrasah yang menjadi landasan program kerja Komite madrasah sesuai AD/ART. sehingga terbentuknya proses kegiatan belajar yang efektif, berkualitas dan meningkatnya mutu pendidikan madrasah menjadi lebih unggul, maju dan menjadi salah satu madrasah yang maju di kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Dengan demikian Komite madrasah telah membuktikan bahwa keberadaan dan peranya menjadi mitra MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan memberikan kontribusi positif dalam menunjang proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan.
2. Upaya Komite madrasah dalam mengevaluasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) adalah keberadaan Komite madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan juga berperan sebagai evaluator program kerja dan peran yang telah dilaksanakan, dan membantu menyelesaikan masalah yang ada di madrasah, baik masalah yang dihadapi meliputi proses

belajar mengajar, perlengkapan sarana prasarana, kesejahteraan guru dan pegawai, serta semua pendanaan yang berhubungan dengan peningkatan mutu Madrasah semua akan dicarikan solusi atau jalan keluar yang terbaik oleh komite. mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja dan perannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, berupa: (1) Rapat evaluasi pengurus Komite Madrasah setiap akhir semester, (2) Mengadakan pertemuan wali siswa setiap satu tahun satu kali, (3) Menjalinkan kerjasama dengan pimpinan Yayasan Maarif Sukorejo, institusi pemerintah (Depag), tokoh masyarakat dan akademisi pendidikan, (4) Membantu Madrasah dalam pencarian dana untuk pembangunan dan perlengkapan sarana prasarana (5) Melaksanakan kontroling pada setiap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Madrasah.

B. Saran

Komite Madrasah dibentuk sebagai organisasi yang dapat menjadi mitra madrasah dalam menjalin kerjasama antara pihak madrasah, wali siswa, masyarakat dan pemerintah, agar terwujud kerjasama yang aktif dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan pada khususnya, sehingga dapat menghasilkan *output* pendidikan yang berkualitas. Dari hasil kajian dan analisis penelitian mengenai peran Komite Madrasah dalam mendukung Manajemen Berbasis Madrasah, penulis perlu memberi beberapa saran bahwa:

1. Bagi Komite Madrasah

Komite Madrasah lebih memperhatikan permasalahan dan ikut andil dalam menghadapi problem yang muncul di lingkungan Madrasah khususnya mengenai Manajemen madrasah seperti masalah sarana prasarana (penambahasn ruang kelas), pengadaan pelatihan bagi guru-guru sehingga permasalahan tersebut segera dicarikan solusinya. Selain itu, perlu dirumuskan seperangkat peraturan atau kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan program-program komite agar pengurus dan anggota komite tidak lalai dan lebih maksimal dalam memberikan kontribusinya.

2. Bagi Pihak Madrasah

Dikarenakan pembentukan komite madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan adalah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat agar menciptakan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pihak madrasah seharusnya lebih memaksimalkan peran komite madrasah untuk tujuan pengembangan madrasah. Pihak madrasah diharapkan lebih sering mengadakan diskusi dengan komite madrasah untuk menentukan program-program baru yang sesuai dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga tidak ada kesan komite madrasah hanya dimanfaatkan ketika ada sumbangan yang menuntut melewati jalur komite madrasah.

3. Bagi Masyarakat (wali siswa)

Komite madrasah bukanlah BP3 yang hanya terlihat ketika ada penarikan dana dari madrasah. Masyarakat harus bisa memanfaatkan komite madrasah sebagai kepanjangan tangan dari mereka atau sebagai wadah yang menjembatani antara pihak masyarakat (wali siswa dengan pihak madrasah). Oleh karena itu, masyarakat (wali siswa) tidak perlu malu (sungkan), takut untuk mengkritisi maupun memberi saran terhadap kinerja madrasah, dan komite madrasah akan menindak lanjuti kepada pihak madrasah.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Dally Dadang, 2010, *Balanced Score Card Suatu Pendekatan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Departemen Agama RI. 2004, *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-ART)
- Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. 2009. *Modul Pelatihan Menejemen berbasis Madrasah*. Jakarta
- Harun, Rochajat, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasbullah, 2006. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- <http://fkip-unpak.org/suprapto.htm>
- Imron, Ali, 2011, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Komariah Aan, Engkoswara, 2010, *Administrasi Pendidikan*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 044/u/2002 tanggal 2 april 2002
- Lexy Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, dkk, 1992, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan: Tjejep RR Jakarta: UI Press
- Minarti Sri, 2011, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan secara Mandiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

- Muhaimain, 2010, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengembangkan budaya mutu*. Malang: UIN MALIKI PRESS.
- Mulyono, 2008, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Mulyasa, E. 2003. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nana Syaodih, Sukmadinata. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nashiruddin Al- Albani, Muhammad. 2007. *Shahih Sunan AT- Tirmidz*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nasution, 2006, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Prastowo Andi, 2011, *Memahami metode-metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Sagala, Syaiful. 2008. *Administrasi pendidikan kontemporer*. Bandung. CV: Alfabeta.
- Suryosubroto, B. 2004. *Menejemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Dosen FIP IKIP Malang, 2003, *Pengantar Dasar-dasar Kependidikan usaha nasional*
- Umar, Husein. 2003. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Usman, Husaini. 2008. *Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan*. Jakarta: Sinar Grafika offset.
- Umiarso, Gojali Imam.2011. *Menejemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Jogjakarta: IRCiSoD.

TABEL VI
Jumlah Dan Kondisi Ruang MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan
Tahun Ajaran 2013-2014¹.

NO	JENIS RUANG	JUMLAH RUANG	LUAS (M²)	KONDISI RUANGAN	KET
1	Belajar / Kelas	24	882	Baik	
2	Kepala Madrasah	1	8	Baik	
3	Administrasi / TU	1	20	Baik	
4	Guru	1	42	Baik	
5	BP / BK	1	12	Baik	
6	Perpustakaan	1	42	Baik	
7	Lab. Komputer	1	42	Baik	
8	Lab. Bahasa	1	42	Baik	
9	Lab. MIPA	1	42	Baik	
10	Musholla	1	42	Baik	
11	Koperasi / Toko	1	36	Baik	
12	WC / Toilet Siswa	8	30	Baik	
13	WC / Toilet Guru	2	12	Baik	
14	Bank Mini	1	8	Baik	
15	Kantin	1	12	Baik	
JUMLAH		46			

¹ Sumber: Administrasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan 2013/2014, observasi tanggal 30 Januari 2014

TABEL VII
Jumlah Dan Kondisi Fasilitas Penunjang MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan
Tahun Ajaran 2013-2014.²

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH	MERK	KONDISI BARANG	KET
1	Alat Peraga MTK	1 set	-	Baik	
2	Alat Peraga IPA	1 set	-	Baik	
3	Alat Peraga IPS	1 set	-	Baik	
4	Komputer	5 set	-	Baik	
5	Laptop	1 buah	Acer	Baik	
6	Printer	4 buah	Canon, Epson & Samsung	Baik	
7	Alat Olahraga	1 set	-	Baik	
JUMLAH		14			

² Sumber: Administrasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan 2013/2014, observasi tanggal 7 Januari 2014

TABEL VIII
Data Sumber Daya Manusia (SDM)
Tingkat Pendidikan Pegawai
Tahun Ajaran 2013-2014.³

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JML GTY	JML GTT	JML PNS DPK	JUMLAH TOTAL	KET
1	SLTA	1	1		2	
2	SARJANA MUDA	1			1	
3	D-2	-				
4	D-3	-				
5	S-1	24		6	30	
6	S-2	6		2	8	
JUMLAH		31	1	8	41	

³ Sumber: Administrasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan 2013/2014, observasi tanggal 30 Januari 2014

TABEL IX
Data Siswa MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan
Tahun Ajaran 2013-2014.⁴

No	Tahun Pelajaran	Kls VII		Kls VIII		Kls IX		JML		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2010-2011	117	89	112	90	119	126	348	305	653
2	2011-2012	102	75	99	84	102	92	303	251	554
3	2012-2013	96	92	99	79	93	85	288	256	544
4	2013-2014	93	118	94	95	93	78	280	291	571

a) Data Peserta Ujian Nasional

NO	TAHUN PELAJARAN	Jumlah Peserta			Lulus			%	Ket
		L	P	JML	L	P	JML		
1	2010-2011	119	126	245	119	126	245	100	-
2	2011-2012	102	92	194	102	91	193	100	DO
3	2012-2013	93	85	178	1	2	175	100	DO
4	2013-2014	93	78	171					

⁴ Sumber: Administrasi MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan 2013/2014, observasi tanggal 30 Januari 2014



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan sekretaris Komite Madrasah



Siswa Sedang Mengikuti Pembelajaran Quran Hadits



Suasana Perpustakaan Mts. Maarif Sukorejo Pasuruan



Piala hasil prestasi yang diraih siswa siswi Mts. Maarif Sukorejo Pasuruan



Halaman Mts. Maarif Sukorejo Pasuruan



Kantor Kepala Madrasah Mts. Maarif Sukorejo Pasuruan



Pertemuan Pengurus dan Wali Murid Mts. Maarif Sukorejo Pasuruan



Study observasi ke Museum Brawijaya Malang



Studi observasi ke Museum Brawijaya Malang



Pemilihan Ketua OSIS

PEDOMAN INTERVIEW (WAWANCARA)

01. Kepala Madrasah

1. Bagaimana sejarah berdirinya MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan?
2. Bagaimana konsep pengelolaan MBM Madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?
3. Bagaimana konsep pengembangan komite madrasah dalam mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?
4. Apa langkah-langkah yang diambil Kepala Madrasah untuk menggerakkan warga madrasah dalam upaya mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?
5. Program-program apa saja yang dilakukan dalam upaya merealisasikan MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan?
6. Bagaimana proses pengawasan (monitoring) dan evaluasi kinerja pengurus MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?
7. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?
8. Apa saran/harapan Bapak untuk mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?
9. Bagaimana pandangan bapak terhadap kinerja komite madrasah saat ini?

02. Wakil Kepala Madrasah Bidang Pengajaran dan Kurikulum

1. Bagaimana peran bidang kurikulum dalam upaya mendukung MBM?
2. Langkah apa yang dilakukan oleh bidang kurikulum dalam upaya mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan?
3. Program apa saja yang dilakukan bidang kurikulum dalam mendukung terlaksanakannya MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?
4. Bagaimana sistem pelaksanaan program-program tersebut ?
5. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh bidang kurikulum dalam upaya mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?
6. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan?
7. Apa saran/harapan Bapak untuk upaya mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?

03. Ketua Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan

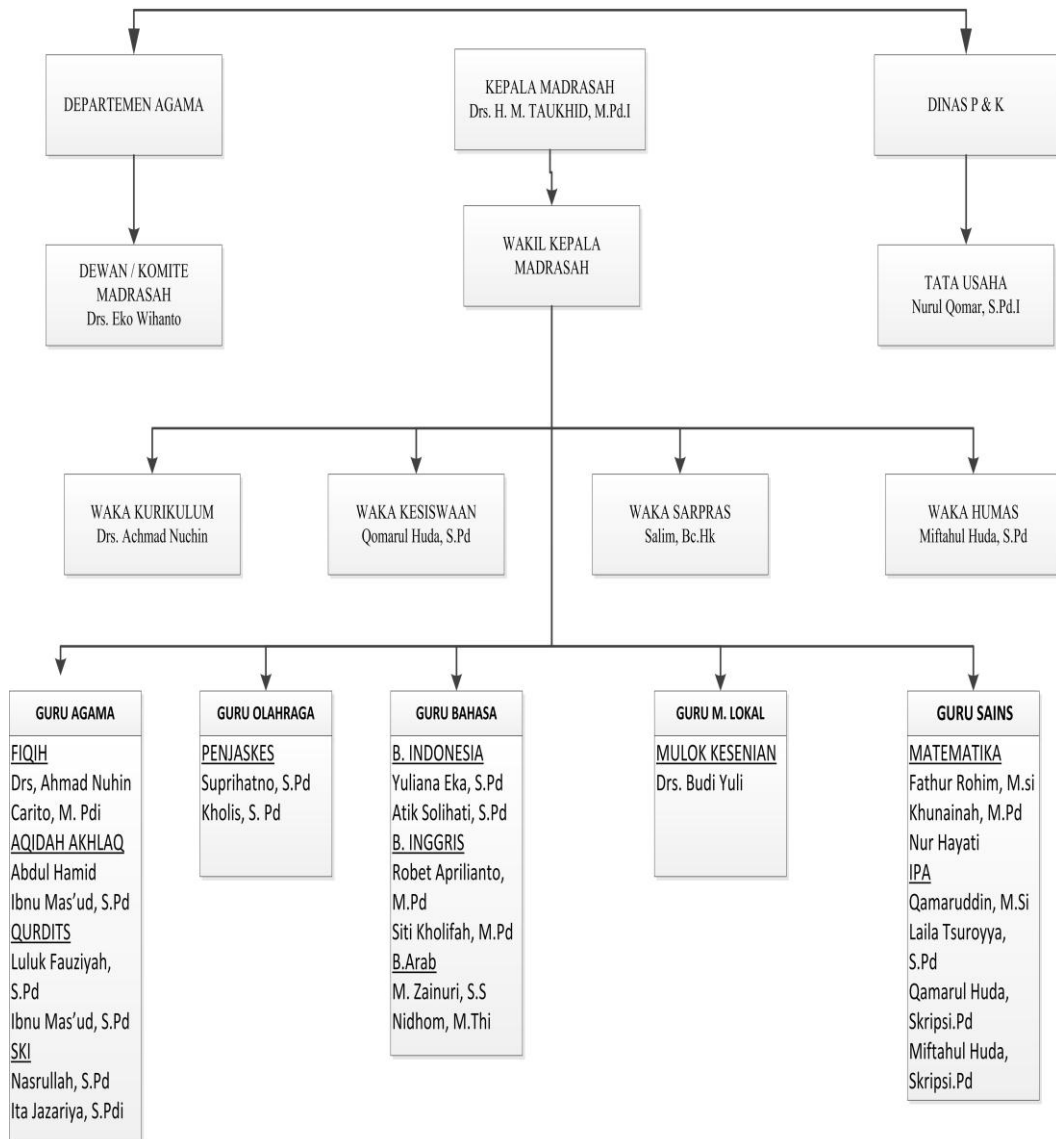
1. Sejak tahun berapakah dibentuk kepengurusan Komite Madrasah MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?

2. Apa saja program Komite Madrasah dalam upaya mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan?
3. Bagaimana cara merealisasikannya?
4. Apa faktor pendukung dan penghambatnya?
5. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite madrasah dalam upaya mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?
6. Bagaimana proses kerjasama dengan pengurus Madrasah?
7. Apa saran/harapan Bapak/Ibu untuk upaya mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?

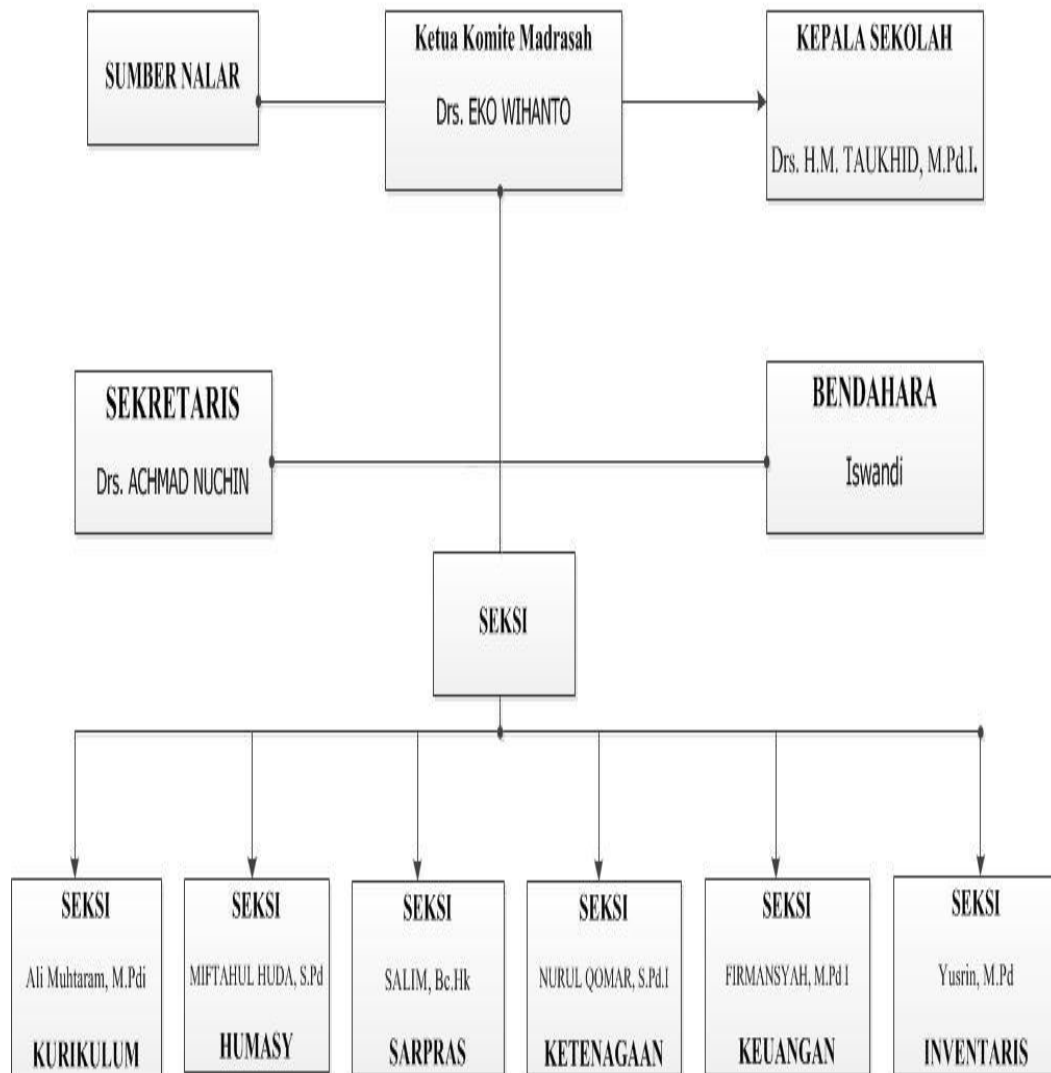
04. Anggota Komite Madrasah/Wakil Masyarakat/ Tokoh Masyarakat/Stake Holders

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait dengan Komite Madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?
2. Bagaimana peran bapak dalam Komite Madrasah di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?
3. Bagaimana peran Bapak dalam upaya mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan ?
4. Apa saran Bapak/Ibu untuk Komite Madrasah atau Pengurus Madrasah dalam upaya mendukung MBM di MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan?

STRUKTUR TATA USAHA
MTs. Maarif Sukorejo Pasuruan
TAHUN PELAJARAN 2013/2014



STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SEKOLAH
MTs MA'ARIF SUKOREJO PASURUAN
2013/2014



Program Kerja
Dewan Pengurus dan Komite Madrasah Mts. Maarif Sukorejo Pasuruan
Tahun 2010/2015

a. Pengurus Harian

No.	Jenis Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pelaksanaan
1	Pertemuan rutin Komite madrasah dengan Kepala Madrasah dan Dewan Guru	Kepala Madrasah dan Dewan guru	Adanya komunikasi dan koordinasi yang harmonis	Setiap Bulan
2	Minta laporan berkala	Masing-masing satuan tingkat pendidikan	Untuk dapat mengetahui perkembangan, hambatan dari masing-masing pendidik	Setiap bulan
3	Pertemuan berkala dewan pengurus, komite madrasah dengan wali murid	Wali murid	Adanya komunikasi dan koordinasi yang harmonis	Awal tahun ajaran

b. Bidang : Perkembangan Kualitas Pendidikan

No.	Jenis Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pelaksanaan
1	Supervisi program kepala	Kepala Madrasah	Telah RAPBSMeningkatkan kompetensi	Juli (akhir)

	madrasah		komite madrasah - Meningkatkan profesionalitas kepala madrasah - Meningkatkan komitmen kepala madrasah	
2	Supervisi hasil supervisi kepala madrasah	Kepala Madrasah	- Melihat KKM - Ulangan harian tengah semester - Remidi dan pengayaan - Pemerataan KD	Juli, Agustus, September
3	Supervisi pelaksanaan MGMP	Kepala Madrasah	- Peningkatan mutu guru masing-masing Mata Pelajaran, meliputi: - Kalender pendidikan - Rencana pekan efektif - Prota, promes - RPP - Silabus pembelajaran	Setiap bulan

c. Bidang : Pembangunan

No	Jenis Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pelaksanaan
1	Renovasi gedung lantai	Fisik gedung	Dapat digunakan ruang kelas	Tahun 2011

	2 (atas perpustakaan)			
2	Perbaiki gudang belakang perpustakaan	Atap lantai 3 sebelah barat	Dapat digunakan menyimpan alat drumband aliyah	November 2010
3	Renovasi gedung lantai 3	- Sekat - Pintu - Jendela - Eternit	Menjadi kelas yang kondusif	Januari 2011
4	Pengadaan bangku 20 lokal	- Meja belajar murid	Terpenuhinya tempat belajar yang nyaman	2010-2015
5	Renovasi WC siswa	- WC yang ada	Terpenuhinya kebutuhan WC	Desember 2010
6	Sertifikasi tanah	- Tanah hibah H. Yusuf	Pemenuhan kebutuhan lokal kelas	2011-2015
7	Menyewa Lahan Milik Pengairan	- Tanah pengairan sebelah timur YPM	Untuk memenuhi kebutuhan lokal siswa	2010-2015

CURICULUM VITAE

Nama	: AMILA NADIYAH
NIM	: 10110096
Tempat, Tanggal Lahir	: Pasuruan, 23 Desember 1991
Fak./Jur./Prog. Studi	: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/PAI/PAI
Tahun Masuk	: 2010
Alamat Rumah	: Jl.Urip Sumohardjo No.55 Gg.Nusa Indah III Plumbon-Pandaan – Pasuruan RT 006/ RW 006
Alamat di Malang	: Jl. Sunan Kalijaga Dalam No.18A Malang
No Tlpn Rumah/HP	: 085755945111
Email	: Amilanadiyah600@yahoo.co.id
Riwayat Pendidikan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. TK. Dharma Wanita 02 Pandaan Pasuruan (1996-1998) 2. Sekolah Dasar SDN Pandaan 02 Pasuruan (1998-2004) 3. Sekolah Menengah Pertama SMP Maarif Pandaan Pasuruan (2005-2007) 4. Sekolah Menengah Atas SMA Maarif Pandaan Pasuruan (2008-2010) 5. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2010-2014)

Malang, 07 April 2014

MAHASISWA

AMILA NADIYAH